

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN





RENCANA STRATEGIS 2015-2019

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NOMOR: 3506/OT.010/J/04/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.
 - d. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian;
 - e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Renstra Unit Kerja eselon II, Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b. penyusunan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Rencana Kerja setiap unit instansi di lingkup Badan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian;
- c. koordinasi perencanaan kegiatan antar instansi Pusat dan UPT lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- d. pengendalian program dan kegiatan di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.



- KETIGA : Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk:
- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ini ke dalam Rencana Strategis instansi pusat dan UPT masing-masing;
 - b. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Unit Kerja berdasarkan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ini.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Jakarta

Pada tanggal 20 April 2015



Kepala Badan PPSDMP

Winny Dian Wibawa

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Pusat Lingkup Badan PPSDMP;
4. Pimpinan UPT Lingkup Badan PPSDMP.



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
NOMOR: 3506/OT.010/J/04/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2015 – 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) Tahun 2015 – 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini mengacu pada Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015–2045 dengan tema Pertanian Bioindustri Berkelanjutan, serta Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019 yang diarahkan untuk mencapai kecukupan produksi komoditas strategis serta pengurangan ketergantungan impor, peningkatan daya saing produk di dalam negeri, pemantapan dan peningkatan daya saing produk pertanian di dunia internasional, diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu, serta peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Renstra Badan PPSDMP merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Renstra unit kerja lingkup Badan PPSDMP. Kondisi dan isu strategis serta kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi implikasinya dijelaskan secara singkat dalam dokumen ini.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan Renstra ini. Masukan, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak akan membantu penyempurnaan dokumen ini.

Kepala Badan PPSDMP



Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, MSc.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Kondisi Umum	6
C. Potensi dan Permasalahan	17
D. Isu Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	18
II. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT)	43
A. Kekuatan (<i>Strength</i>)	43
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	47
C. Peluang (<i>Opportunity</i>)	51
D. Tantang (<i>Threath</i>)	52
III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	57
A. Visi	59
B. Misi	60
C. Tujuan	61
D. Sasaran Strategis	61
IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	63
A. Arah Kebijakan	65
B. Strategi	69
C. Kerangka Regulasi	79
D. Kerangka Kelembagaan	80



V. PROGRAM, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	80
A. Program.....	87
B. Indikator Kinerja Program	87
C. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	87
VI. PENUTUP	85



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Prosentase tenaga kerja pertanian terhadap angkatan kerja nasional tahun 2010-2013	8
Tabel 2.	Prosentase tenaga kerja pertanian terhadap angkatan kerja nasional tahun 2010-2013	9
Tabel 3.	Tenaga kerja sektor pertanian berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2010-2013	10
Tabel 4.	Jenis dan jumlah aparatur fungsional lingkup Badan PPSDMP per Desember 2013.....	11
Tabel 5.	Jumlah aparatur dan jenis jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian per Desember 2013	13
Tabel 6.	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan	13
Tabel 7.	Keragaan Kelembagaan Petani	14
Tabel 8.	Realisasi anggaran menurut kegiatan utama tahun 2010 - 2013.....	15
Tabel 9.	Capaian kinerja kegiatan Badan PPSDMP tahun 2010 - 2013.....	47
Tabel 10.	Jumlah lembaga tingkat daerah yang dibina Badan PPSDMP	48
Tabel 11.	Pokok-Pokok Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.....	60
Tabel 12.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019	62
Tabel 13.	Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015-2019	88



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Arah kebijakan Badan PPSDMP.....68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Program, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2015-2019
- Lampiran 2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Utama Badan PPSDMP Tahun 2015-2019
- Lampiran 3. Daftar Alamat STPP Badan PPSDMP
- Lampiran 4. Penyelenggaraan dan Kegiatan Diklat Pertanian
- Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Pertanian Swadaya (s/d Desember 2014)





BAB I

PENDAHULUAN





I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada periode tahun 2010-2014 meliputi: peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan peningkatan kesejahteraan petani, dilakukan melalui strategi yang dikemas dalam 7 gema revitalisasi yaitu: (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir, telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 9,22% dengan pertumbuhan sekitar 3,19%. Sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja. Investasi di sektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2 % dan 18,6 % per tahun. Rasio ekspor-impor pertanian Indonesia sekitar 10 berbanding 4, dengan laju pertumbuhan ekspor mencapai 7,4 % dan pertumbuhan impor 13,1 % per tahun. Neraca perdagangan tumbuh positif dengan laju 4,2 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan



yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 % dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010–2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian, menurun dengan laju sebesar -3,69 % per tahun (dari 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014).

Pembangunan pertanian dalam lima tahun kedepan (2015 – 2019) diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati sebagai petani. Pertanian mandiri adalah adanya kemerdekaan dan kedaulatan negara maupun petani dalam segala hal terkait pembangunan pertanian. Pertanian maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang memiliki keunggulan, khususnya di bidang pertanian tropika. Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusaha, politik dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral, bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian yang makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.

Untuk mewujudkan arah pembangunan pertanian tersebut, digunakan dua pendekatan, yaitu: Pertama, Pembangunan Ekonomi berdasarkan Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (pada tataran nasional); dan Kedua, Pembangunan Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan Paradigma Biokultura (pada tataran sektoral). Paradigma Pertanian untuk Pembangunan menekankan sepuluh fungsi yang harus diemban, yaitu: (1) Pengembangan sumber daya insani; (2) Ketahanan pangan; (3) Penguatan ketahanan penghidupan keluarga; (4) Basis pengembangan bioenergi; (5) Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan; (6) Jasa lingkungan alam; (7) Basis untuk pengembangan bioindustri; (8) Penciptaan iklim kondusif bagi pembangunan; (9) Penguatan daya tahan perekonomian; dan (10) Sumber pertumbuhan berkualitas.



Konsepsi Strategi Induk Pembangunan Pertanian (edisi ke-2), merumuskan visi pembangunan pertanian Indonesia 2015–2045 yaitu “Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumber daya hayati pertanian dan kelautan tropika”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan pertanian yang salah satunya mencakup pengembangan sistem penelitian untuk pembangunan pertanian bioindustri berorientasi inovasi pertanian spesifik lokasi, pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, peningkatan *entrepreneurship* (kewirausahaan) pertanian dan penguatan modal sosial.

Fokus strategi utama mewujudkan misi tersebut adalah pengembangan sumber daya insani yang kompeten dan berkarakter (insan berkualitas, modal sosial dan modal politik) pertanian serta kelembagaannya. Kebijakan pengembangan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan dalam aspek sumber daya insani pertanian diarahkan untuk menjamin pembangunan pertanian berorientasi pada kedaulatan petani, utamanya petani kecil. Hal tersebut berarti manajemen dan dukungan kebijakan usaha pertanian bioindustri sepenuhnya berdasarkan pada aspirasi petani, dilaksanakan oleh petani dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Adapun dalam aspek pengembangan kelembagaan petani, kebijakan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi, politik dan sosial petani yang esensial. Untuk meningkatkan kapabilitas usaha, advokasi kepentingan politik kebijakan dan penguatan solidaritas sosial petani skala kecil.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kementerian Pertanian selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, sasaran strategis Kementerian Pertanian ke depan adalah: (1) peningkatan ketahanan pangan, (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor, (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi, serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian melalui 8 Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang meliputi: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi,



(7) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dan (8) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi. Peran utama Badan PPSDMP untuk mewujudkan sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah pada strategi penguatan kelembagaan petani dan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Peran tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

B. Kondisi Umum

1. Internal

Pada periode 2010-2014 kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian ditujukan untuk: menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani; meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur pertanian; menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten dan tersertifikasi; dan meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut, Badan PPSDMP melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu: (1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian; (2) Pemantapan sistem pelatihan pertanian; (3) Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian; (4) Dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya; serta (5) Pendidikan menengah pertanian.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan utama tersebut ditempuh melalui strategi: (1) Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat; (2) Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan; (3) Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta; (4) Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdayasaing; (5) Penataan serta peningkatan kompetensi THL-TBPP; (6) Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang



profesional dan kredibel; (7) Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian; (8) Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian; (9) Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan petani (P4S); (10) Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian; (11) Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian; (12) Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian; (13) Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian; (14) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian; (15) Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian; (16) Pemantapan sistem perencanaan; (17) Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan (18) Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

Dalam melaksanakan strategi tersebut, Badan PPSDMP didukung sumber daya manusia pertanian, kelembagaan pemerintah, kelembagaan petani, penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan, serta dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia pertanian

Berdasarkan peranan dalam pembangunan sektor pertanian, SDM pertanian diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yaitu non aparatur (pelaku utama dan pelaku usaha pembangunan pertanian) dan aparatur yang berperan sebagai pendukung dalam proses pembangunan pertanian.

1) Non aparatur

Tenaga kerja *on farm* di sektor pertanian dalam lima tahun terakhir mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 31.78%/tahun terhadap angkatan kerja nasional. Tenaga kerja ini mengalami penurunan sebesar 2.57%/tahun terhadap angkatan kerja pertanian atau 3.55%/tahun terhadap angkatan kerja nasional. Penurunan ini terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari *on farm* ke sektor industri dan jasa dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi di



sektor pertanian. Penurunan jumlah tenaga kerja ini menguntungkan karena dapat mengurangi beban tenaga kerja. Dengan demikian pendapatan rata-rata petani diharapkan akan meningkat. Fungsi dari tenaga kerja yang berpindah tersebut diharapkan dapat digantikan dengan penerapan mekanisasi pertanian. Prosentase tenaga kerja pertanian terhadap angkatan kerja nasional tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Prosentase tenaga kerja pertanian terhadap angkatan kerja nasional tahun 2010-2013

Tahun	Tenaga kerja pertanian (juta orang)	Angkatan Kerja Nasional (juta orang)	Prosentase (Pertanian/ Nasional, %)
2009	38,61	113,74	33,94
2010	38,69	116,53	33,20
2011	36,54	109,67	33,32
2012	36,42	118,05	30,85
2013*)	35,76	121,19*	29,74
Rata-rata	36,85	116,36	31,78

Ket :* angka proyeksi

Sumber: (BPS, Februari, 2014)

Angkatan kerja pertanian menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa prosentase rata-rata tertinggi berada pada tingkat pendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD yaitu 74,46% dari tahun 2010-2013. Sedangkan prosentase petani dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 15,71%, tingkat pendidikan SMU/SMK sebesar 9,15% dan tingkat universitas/DIV sebesar 0,68%. Secara rinci prosentase tenaga kerja pertanian berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Tenaga kerja sektor pertanian berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2010-2013

Tahun	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD		SLTP		SMU/SMK		Univ/ D IV		Total
	Juta (orang)	(%)	Juta (orang)	(%)	Juta (orang)	(%)	Juta (orang)	(%)	Juta (orang)
2010	28,88	74,64	6,28	16,23	3,31	8,56	0,22	0,57	38,69
2011	27,38	74,95	5,65	15,47	3,30	9,03	0,20	0,55	36,53
2012	26,99	74,13	5,67	15,57	3,46	9,50	0,29	0,80	36,41
2013*	26,71	74,11	5,61	15,57	3,43	9,52	0,29	0,80	36,04
Rata-rata	27,49	74,46	5,80	15,71	3,38	9,15	0,25	0,68	36,92

Ket : * angka proyeksi

Sumber: BPS (Februari, 2014 - Sakernas)

Berdasarkan data sensus pertanian 2013, BPS mencatat bahwa jumlah rumah tangga pertanian adalah sekitar 26,13 juta (11% dari total penduduk Indonesia). Terkait kepemilikan lahan pertanian, dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 Juta (61,5%) tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani sebagai buruh tani di lahan-lahan petani lain maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar. Rumah tangga pertanian menguasai lahan pertanian rata-rata kurang dari 0,5 hektar.

2) Aparatur

Aparatur di sektor pertanian terdiri atas aparatur fungsional dan struktural. Per November 2014, jenis jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian secara total ditampilkan pada Tabel 3 berikut:



Tabel 3. Jenis jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian per November 2014

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah (orang)
1.	Guru di SMK-PP	60
2.	Dosen di STPP	205
3.	Widyaiswara	194
4.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3.808
5.	Pengawas Benih Tanaman	3.471
6.	Pengawas Bibit Ternak	117
7.	Medik Veteriner	112
8.	Paramedik Veteriner	472
9.	Pengawas Mutu Pakan	40
10.	Penyuluh Pertanian PNS	27.485
	- Pusat :	34
	BPPSDMP	24
	BBP2TP	10
	- Provinsi :	673
	Bakorluh	402
	BPTP	271
	- Kab/Kota	2.982
	- Kecamatan	11.976
	- Desa/Kelurahan	11.820
11.	THL-TB Penyuluh Pertanian	20.479
Total		56.443

Sumber : Badan PPSDMP dalam Angka (2014)

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian masih jauh dari jumlah ideal yaitu 1 desa 1 penyuluh. Ketersediaan penyuluh pertanian di desa baru mencapai 45,19% (sebanyak 32.299 orang dari 71.479 desa potensi pertanian), sehingga saat ini satu orang penyuluh membina 2-3 desa/kelurahan. Komposisi penyuluh pertanian yang berada di desa terdiri atas penyuluh pertanian PNS sebanyak 11.820 orang dan THL-TB Penyuluh Pertanian sebanyak 20.479 orang. Kekurangan jumlah penyuluh pertanian di tingkat lapangan diakomodasi dengan penyediaan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) sebanyak



20.479. Pengurangan jumlah penyuluh pertanian di desa karena pensiun sebanyak 5.792 orang (49% dari 11.820 orang), mengindikasikan bahwa rekrutmen penyuluh perlu segera dilakukan. Dari segi kompetensi, penyuluh pertanian selama ini kurang ditunjang oleh upaya peningkatan kompetensi, agar mampu menjalankan perannya lebih baik yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan petunjuk kerja yang ditetapkan.

Sampai dengan tahun 2014, aparatur fungsional lingkup Badan PPSDMP di tingkat Pusat berjumlah 535 orang, sedangkan aparatur fungsional lingkup Kementerian Pertanian secara keseluruhan berjumlah 56.443 orang. Secara rinci, aparatur fungsional lingkup Badan PPSDMP diuraikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jenis dan jumlah aparatur fungsional lingkup Badan PPSDMP per Desember 2014.

No	Jenis	Jumlah (orang)
1.	Perencana	5
2.	Guru Pertanian	60
3.	Dosen	205
4.	Widyaiswara Pertanian	194
5.	Penyuluh Pertanian	24
6.	Pustakawan	16
7.	Instruktur	1
8.	Analisis Kepegawaian	9
9.	Statistisi	1
10.	Pranata Humas	8
11.	Arsiparis	2
12.	Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)	9
13.	Pranata Komputer	1
Total		535

Sumber : Badan PPSDMP dalam Angka (2014)

b. Kelembagaan pemerintah dalam pengembangan SDM pertanian

Kelembagaan pemerintah dalam mendukung pengembangan SDM pertanian terdiri atas kelembagaan penyuluhan pertanian, lembaga pelatihan pertanian dan lembaga pendidikan pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah. Lembaga di tingkat pusat adalah: Badan PPSDMP yang terdiri atas 4 (empat) Unit Kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan,



Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Hingga tahun 2014 masih terdapat 2 provinsi yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai UU Nomor 16 tahun 2006 yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan. Hingga tahun 2014, kabupaten yang sudah membentuk kelembagaan penyuluhan sebanyak 74,09% (306 unit), kota yang sudah membentuk kelembagaan penyuluhan sebanyak 30,61% (30 unit).

Kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). Kelembagaan penyuluhan Kecamatan yang sudah memiliki kelembagaan penyuluhan sebanyak 74,74% (5.232 unit dari total 7.000 kecamatan). Secara rinci sebaran kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan diuraikan pada pada Tabel 5.



Tabel 5. Kelembagaan penyuluhan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

No.	Wilayah	Jumlah	Kelembagaan Penyuluhan (unit)		
			Sesuai UU No.16 Tahun 2006	Bergabung dengan KP	Dinas
1	Provinsi	34	22	10	2
2	Kabupaten	413	141	165	107
3	Kota	98	11	19	68
4	Kecamatan	7.000	5.232		

Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSDMP (November, 2014)

c. Kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian

Berdasarkan laporan Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2014, terdapat 322.390 Kelompok Tani (Poktan), 37.632 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 10.065 Kelembagaan Ekonomi Petani (Koptan, BUMP) dan 6.596 unit Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes). Keragaan kelembagaan petani disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Keragaan kelembagaan petani

No.	Bentuk Kelembagaan	Jumlah (Unit)
1.	Poktan	322.390
2.	Gapoktan	37.632
3.	Kelembagaan Ekonomi Petani (Koptan, BUMP)	10.065
4.	Posluhdes	6.596

Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan PPSDMP (November, 2014)

Jumlah Petani yang sudah tergabung dalam Poktan sejumlah 10.380.380 orang (39,32 % dari jumlah 26.400.000 KK tani, BPS 2013). Rata-rata jumlah anggota per poktan sebanyak 32 orang. Posluhdes yang terbentuk sebanyak 8,32% dari jumlah desa sebanyak 79.313 desa.



d. Capaian kinerja

Capaian kinerja selama tahun 2010-2014 sebesar 88,90% dari anggaran senilai Rp6.661.053,91 (dalam juta). Realisasi ini tidak mencapai 100% dikarenakan adanya optimalisasi untuk penghematan barang dan jasa (perjalanan, bansos, dan jasa profesi), tidak terealisasinya pengadaan kendaraan motor di pusat pada tahun 2013, dan sisa anggaran akomodasi serta konsumsi pertemuan/rapat pada tahun 2014. Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan Utama Tahun 2010 - 2014

No.	Kegiatan Utama	Pagu*) (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	%
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	3.625.121,05	3.305.929,89	91,20
2.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1.764.187,15	1.503.746,06	85,24
3.	Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	747.261,37	662.012,99	88,59
4.	Pendidikan Menengah Pertanian	234.430,05	194.416,33	82,93
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	290.054,29	255.587,70	88,12
Total		6.661.053,91	5.921.692,97	88,90

*) Tahun 2010 - 2014

Sumber : Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan BPPSDMP 2014 (Januari, 2015)

Rincian capaian kinerja kegiatan Badan PPSDMP selama periode 2010-2013 dapat dijelaskan pada Tabel 8 berikut:



Tabel 8. Capaian Kinerja Kegiatan Badan PPSDMP tahun 2010 - 2013

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Pelatihan bagi aparatur di sektor pertanian (orang)	65.091	64.738	99,46
2	Pelatihan non aparatur di sektor pertanian (orang)	62.147	62.864	101,15
3	Peningkatan kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian melalui fasilitasi honor dan BOP (orang)	191.928	201.081	104,77
4	Penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian di STPP (orang)	8.012	8.200	102,35
5	Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian di SMK-PP	39.488	36.645	92,80
6	Pemberdayaan kelompok tani (unit)	94.003	80.752	85,90
7	Diklat Fungsional RIHP bagi penyuluh dan non-penyuluh pertanian (orang)	2.240	5.134	229,20
8	Pengembangan usaha agribisnis dan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan) melalui Farmers Managed Activities (FMA) (orang)	6.160	5.854	95,03
9	Pembangunan gedung BPP baru (unit)	278	266	95,68
10	Pengembangan wirausahawan muda melalui bantuan modal kerja usaha bagi lulusan SPP terbaik (<i>seed money</i>) (orang)	252	234	92,86
11	Retooling lulusan D4/S1 dibidang perkebunan	687	597	86,90
12	Fasilitasi alat pengolah data <i>cyber extension</i> di BPP(unit)	1.000	1.000	100,00

Sumber : LAKIP Badan PPSDMP Tahun 2010 s/d 2013 (diolah)



2. Eksternal

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling terkena dampak perubahan iklim, sehingga menjadi tantangan untuk mengelola kegiatan pertanian ditengah kondisi alam yang cepat berubah. Jika dilihat dari aspek perekonomian, ancaman terhadap perekonomian nasional terus meningkat seiring dengan kecenderungan peningkatan pasar dan perekonomian dunia. Salah satu konsekuensi dari liberalisasi dan globalisasi pasar dan perekonomian tersebut, Indonesia harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.

Persaingan bebas di era globalisasi ekonomi dan peningkatan kesadaran konsumen atas mutu produk pertanian menuntut peningkatan kemampuan seluruh pelaku agribisnis untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas/keberlanjutan. Peningkatan ini harus diiringi dengan terciptanya kemandirian petani yang dicirikan dari perilakunya yang modern, efisien dan berdaya saing tinggi, dengan kapabilitas pengelola usaha tani yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, sosial dan ekonomi, serta kemampuan bekerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain. Dalam hal ini, peran Badan PPSDMP adalah menghasilkan SDM Pertanian yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar tenaga kerja pertanian dan menghasilkan produk yang mempunyai daya saing tinggi di pasar global.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian petani sebagai masyarakat yang tinggal di perdesaan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan merupakan. Pemberdayaan tersebut perlu dilandaskan pada penguatan modal sosial yang meliputi tata nilai/norma, kepercayaan/trust, dan jejaring/networking. Pemberdayaan masyarakat perlu memfokuskan pada kompetensi SDM, manajemen, keorganisasian masyarakat, struktur, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



C. Potensi dan Permasalahan

Secara umum, permasalahan dalam pengembangan SDM Pertanian adalah kurang memadainya jumlah dan kualitas SDM (petani, penyuluh, dosen/ guru dan widyaiswara), belum optimalnya peran kelembagaan, terutama manajemen, belum maksimalnya peran penyuluh dalam alih teknologi dan informasi, kurang memadainya sarana dan prasarana penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Adapun permasalahan yang terkait dengan penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta administrasi manajemen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam kegiatan penyuluhan pertanian:

- (1) Rendahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan
- (2) Kurangnya jumlah dan kompetensi penyuluh
- (3) Rendahnya kapasitas petani dan kelembagaan petani
- (4) Lemahnya transfer teknologi dari sumber informasi ke petani
- (5) Kurangnya dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh.

2. Permasalahan dalam kegiatan pelatihan pertanian:

- (1) Kurangnya jumlah, sebaran yang tidak merata serta rendahnya kapasitas dan kompetensi penyelenggara kediklatan (widyaiswara dan tenaga kediklatan)
- (2) Kurangnya dukungan prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek)
- (3) Masih rendahnya efektivitas hasil pelatihan
- (4) Belum terpenuhinya standarisasi mutu layanan kediklatan (ISO)
- (5) Belum adanya tindak lanjut hasil sertifikasi pogram/kegiatan diklat.

3. Permasalahan dalam kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian:

- (1) Rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke SMK-PP dan STPP
- (2) Belum memadainya kondisi infrastruktur, jumlah dan kualitas SDM kependidikan
- (3) Pengakuan eksistensi STPP masih bersifat “lokal” dan tidak semua lulusan dapat memenuhi standar/kualitas yang dibutuhkan
- (4) Belum terciptanya iklim belajar yang kondusif di unit kerja pendidikan.

4. Permasalahan dalam kegiatan dukungan administrasi manajemen dan teknis lainnya:



- (1) Belum konsistensinya penerapan *e-planning* dalam perencanaan program dan anggaran
- (2) Belum primanya kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik
- (3) Kurangnya efektivitas dan akuntabilitas kegiatan serta pengendalian internal
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai belum sepenuhnya optimal dan berkesinambungan
- (5) Koordinasi internal antara unit kerja lingkup Badan PPSDMP dan koordinasi eksternal Badan PPSDMP dengan unit kerja terkait belum berjalan dengan optimal;
- (6) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya belum optimal.

D. Isu Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, dan peternak; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, pemerintah (Kementerian Pertanian) berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan khususnya di bidang pertanian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mendefinisikan penyuluhan pertanian sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian



sebagai salah satu institusi penyuluhan tingkat nasional dalam konteks organisasi Kementerian Pertanian adalah sebagai pendukung fungsi peningkatan produksi berbagai subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan), mempunyai peran utama dalam meningkatkan kemampuan pelaku utama (petani, peternak, pekebun, beserta keluarga intinya) dan pelaku usaha (perorangan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan) pembangunan pertanian, melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian.

Dalam kerangka organisasi, Badan PPSDMP bertanggung jawab untuk menyediakan SDM pertanian yang kompeten dan profesional di bidangnya, melalui fungsi penyuluhan, pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Hal ini selanjutnya tercermin dalam fokus program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang meliputi peningkatan efektivitas penyuluhan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan pertanian, pengembangan kerjasama dan profesionalisme kediklatan serta pemberdayaan STPP dan SMK-PP, serta peningkatan kompetensi SDM pertanian melalui sertifikasi profesi.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, BPPSDMP memandang perlu untuk memperhatikan beberapa isu strategis yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, dan menjadi cerminan dalam penyusunan program dan kegiatan di lapangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan pertanian. Isu strategis itu meliputi: (1) penguatan BP3K sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di kecamatan; (2) memperkuat sistem penyuluhan melalui jaringan internet (*cyber extension*); (3) peningkatan kompetensi SDM pertanian melalui standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; (4) Peningkatan Fasilitas Balai Pelatihan melalui pelayanan prima dan bertaraf internasional; (5) pengembalian minat generasi muda di bidang pertanian melalui kesempatan pendidikan bagi anak petani berprestasi; dan (6) Penerapan *good governance* (tata kelola yang baik). Secara rinci isu-isu strategis penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diuraikan sebagai berikut:



1. Penguatan BP3K Sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

Lembaga penyuluhan pemerintah yang menjadi garda terdepan pelayanan penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam proses percepatan pembangunan pertanian melalui tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan di wilayah. Hal ini dikarenakan BP3K sebagai institusi terdepan yang secara langsung berhubungan dengan pelaku utama pembangunan pertanian dalam hal ini petani, peneliti, penyuluh dan pelaku usaha di bidang pertanian serta kelompok masyarakat peduli pembangunan pertanian.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, BP3K merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki tugas: (1) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota; (2) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; (3) memfasilitasi proses pembelajaran dengan mengikhtiarkan kemudahan akses ke sumber yang dibutuhkan petani melalui penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar dan pemasaran; (4) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; (5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan (6) melaksanakan proses pembelajaran melalui kaji terap dan percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; (7) memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh dan petani.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BP3K berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi juga harus mampu melakukan perakitan teknologi spesifik lokasi, model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi dan dokumentasi dalam perpustakaan, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi,



musyawarah, dll) pelaksanaan program penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan (BP3K) juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.

Upaya penguatan BP3K sebagai pendorong efektivitas penyuluhan, **pertama** dapat dilakukan melalui *sharing* pendanaan dari semua *stakeholders* dan dari berbagai jenis dan sumber anggaran (APBD, APBN, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, kerjasama, penguatan permodalan, serta pola kemitraan). Hal ini agar fungsi BP3K seperti pelaksanaan kegiatan demplot, *field day*, kaji terap, magang petani, kursus tani, rembug tani, pelatihan dan lain-lain dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2006, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan. Kerjasama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horizontal, maupun lintas sektoral. Kerjasama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Upaya **kedua** adalah dukungan dari berbagai lembaga dalam bentuk sinergitas pembinaan. Sinergitas pembinaan BP3K dapat dilakukan oleh: Dinas Teknis lingkup Pertanian dalam bentuk Latihan dan Kunjungan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, kajian kelembagaan (aspek konsep, peran, kelas, kemitraan), dan pengembangan model kewirausahaan. Agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif maka dukungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP) dan Balai Diklat Pertanian (BDP) dalam meningkatkan fungsi BP3K dilakukan melalui kegiatan penguatan kelembagaan, sarana prasarana, metode pelatihan, pelatihan penyuluh, petani dan pelaku usaha, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis agribisnis dan pelatihan manajemen BP3K. Pelaksanaan pelatihan dapat melibatkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).



Peningkatan efektivitas penyuluhan dengan menjadikan BP3K sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di kecamatan harus dibarengi dengan pemberdayaan dan penguatan peran BP3K. Kedepan, BP3K harus dapat berperan sebagai: (1) pusat koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan pertanian; (2) pusat kaji terap dan demonstrasi plot dengan pendampingan dari peneliti dan penyuluh BPTP; (3) pusat data dan informasi pertanian mencakup data wilayah (seperti potensi komoditas, kelembagaan tani, sumberdaya manusia, sarana prasarana, kondisi sosial ekonomi dan lain-lain); (4) pusat manajemen kewilayahan; (5) pusat pelatihan dan konsultasi petugas dan petani.

Pendekatan pengembangan kawasan merupakan upaya **ketiga** adalah meningkatkan efektivitas penyuluhan di BP3K, dengan kegiatan yang berfokus pada pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroekosistem, sistem agribisnis, partisipatif dan terpadu. Mengacu Permentan 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, maka tahapan pengembangan kawasan meliputi: (1) tahap penumbuhan kawasan; (2) tahap pengembangan kawasan; (3) tahap pematangan kawasan; (4) tahap integrasi kawasan; dan (5) tahap replikasi kawasan. Masing-masing tahapan mempunyai jenis kegiatan yang berbeda tergantung pada tingkat ketergantungan pertanian, kekuatan subsistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan.

Kegiatan pengembangan kawasan pertanian yang dilakukan oleh Badan PPSDMP dapat dilakukan melalui Model Pembinaan Secara Terpadu terhadap BP3K. Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan memberikan dukungan melalui kegiatan pelatihan yang dialokasikan di BP3K dan desa binaan, pusat penyuluhan memberikan dukungan melalui kegiatan pengawalan dan pendampingan kepada poktan dan gapoktan dan pusat pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta UPT pendidikan memberikan dukungan melalui kegiatan pengabdian masyarakat di desa mitra.



2. Memperkuat Sistem Penyuluhan Melalui Jaringan Internet

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah melahirkan perubahan tatanan sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aplikasi TIK melalui media elektronik komputer dan jaringan internet merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Penggunaan TIK dan kemudahan akses informasi telah semakin luas di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Pada akhirnya TIK memberikan kontribusi yang potensial dalam mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sektor pertanian, informasi melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan dunia maya telah merambah sampai ke pelosok desa. Pengembangan informasi dan inovasi pertanian berbasis TIK, dilakukan menggunakan jaringan komputer terprogram, yang terkoneksi dengan internet dan dikenal dengan istilah *Cyber Extensión*. *Cyber extensión* merupakan salah satu mekanisme pengembangan jaringan komunikasi informasi inovasi pertanian yang terprogram secara efektif, dengan mengimplementasikan TIK dalam sistem penyuluhan pertanian, yang dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh, melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat waktu, dan relevan dalam mendukung proses pengambilan keputusan penyuluh, guna penyampaian data dan informasi pertanian kepada petani dan kelompoknya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang mencakup suatu daerah yang luas, memandang penting penggunaan *cyber extensión* dalam upaya memberikan pendidikan untuk semua orang. Keberadaan *cyber extensión* diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja penyuluhan, dalam pelayanan data dan informasi pertanian yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu, dan akuntabel. *Cyber extensión* juga merupakan salah satu mekanisme inovasi pertanian yang dapat difungsikan untuk mempertemukan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan pelayanan dengan diseminator inovasi (penyuluh), pendidik, petani dan stakeholders lainnya yang memiliki kebutuhan dengan jenis dan bentuk informasi yang berbeda, sehingga dapat berperan sinergis dan saling melengkapi.



Seiring perkembangan zaman, sistem penyuluhan pembangunan harus dinamis menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Penggunaan sistem jaringan dalam penyuluhan dapat membantu petani kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki praktek pertanian, dengan cara memberikan akses ke sumber informasi tentang cara-cara bertani dan pengembangan pasar. Sebagai contoh, Vietnam telah mengembangkan situs web untuk memasarkan hasil-hasil desa. Di India, seperti e-Choupal, dan *Village Knowledge Centre* telah berhasil menghubungkan desa-desa miskin dengan pasar eksternal. Selanjutnya salah satu model *cyber extensión* yang dikembangkan di Jepang dengan cukup pesat adalah *computer network system* yang dikenal dengan *Extension Information Network (El-net)*. Sistem El-net merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah pusat, provinsi, lembaga penelitian, perusahaan pertanian, pasar, penyuluh dan petani. Pemerintah pusat menyediakan data statistik hasil penelitian, dan lain-lain. Perusahaan swasta pertanian menyediakan informasi terkait dengan pupuk, pestisida, mesin dan peralatan pertanian.

Sistem penyuluhan melalui komputer dan jaringan internet diharapkan mampu mengubah paradigma lama sistem penyuluhan pertanian, kepada paradigma baru sistem penyuluhan melalui jaringan terkoneksi internet *cyber extensión*, yang lebih cepat, dapat diterima dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Penyuluhan konvensional, yaitu penyuluh biasa menunggu pasokan materi dan informasi pertanian yang disiapkan pemerintah (Kementerian Pertanian) dalam bentuk tercetak (seperti *leaflet*, brosur, poster, liptan) dan dalam bentuk elektronik (seperti film, dialog interaktif, siaran radio), dengan jumlah yang terbatas dan sering terlambat, serta dengan biaya yang relatif tinggi. *Cyber extensión* yang dikembangkan tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem dalam komunikasi (dalam penyuluhan) yang berjalan, tetapi hanya untuk menambah tingkat interaktif (komunikasi), menambahkan kecepatan (informasi), memperdalam komunikasi dua arah, memperluas jangkauan, dan juga memberikan pesan/informasi yang lebih mendalam. *Cyber extensión* diharapkan dapat memperluas jangkauan komunikasi, menambah mutu/kualitas informasi, mengurangi biaya-biaya, mengurangi



waktu dan mengurangi ketergantungan pada banyak orang para "aktor" di dalam rantai sistem penyuluhan.

Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP), memandang perlu untuk mendukung sistem informasi penyuluhan yang mampu melakukan percepatan data dan informasi pertanian sampai ke lapangan dengan tepat waktu, tepat tempat, tepat guna, dan tepat sasaran. Sistem informasi penyuluhan tersebut dilakukan dengan memodifikasi penyusunan dan penyebaran data dan informasi pertanian melalui portal sistem jaringan yang terkoneksi dengan internet yang disebut dengan istilah *cyber extensión* (Badan PPSDMP, 2010). Secara singkat dikatakan bahwa *cyber extensión* Kementerian Pertanian adalah sistem informasi penyuluhan pertanian melalui multimedia interaktif berjaringan internet (berbasis informasi teknologi) yang dibangun untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha guna pencapaian sukses pembangunan pertanian.

Adopsi dan penggunaan teknologi dalam organisasi pertanian khususnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: (1) akses terhadap teknologi informasi, (2) demografi, (3) pelatihan/pendidikan bidang teknologi informasi, (4) tingkat kepercayaan terhadap teknologi informasi itu sendiri, dan (5) waktu atau lama menggunakan teknologi informasi. Faktor lain yang membatasi penggunaan TIK disebabkan kurangnya kemampuan menggunakan, kurangnya kesadaran akan manfaat, terlalu sulitnya untuk digunakan, kurangnya infrastruktur teknologi, tingginya biaya teknologi, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem, kurangnya pelatihan aplikasi, integrasi sistem dan rendahnya ketersediaan perangkat lunak. Kendala utama dalam menghadapi tantangan penyuluhan saat ini adalah keterbatasan sumberdaya manusia (tenaga profesional) di bidang penyuluhan pembangunan, baik secara kuantitas maupun kualitas yang menunjukkan masih lemahnya kompetensi penyuluh pertanian. Idealnya penyuluh lapangan itu juga profesional, mempunyai kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, dan mampu berimprovisasi secara bertanggungjawab sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang dihadapi.



Adopsi pemanfaatan *cyber extensión* sektor pertanian, khususnya dalam aplikasi TIK di tingkat penyuluh maupun petani tidak dapat dilakukan dengan spontan. Teknologi ini harus diajarkan dan dipelajari (diadopsi) untuk kemudian diintegrasikan ke dalam proses produksi (usahatani). Keterbatasan infrastruktur dan biaya teknologi merupakan salah satu faktor pembatas penggunaan TIK, juga dipengaruhi oleh kompleksitas usahatani (skala usaha pertanian), tingkat pendidikan, usia, pengalaman, waktu pemanfaatan TIK, tingkat dukungan lingkungan, jaringan, ketersediaan informasi, kepribadian dan pendekatan proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa, salah satu penyebab ketidakhandalan penyuluh pertanian dilapangan dewasa ini, dikarenakan lemahnya sistem informasi pertanian, yang dibuktikan dari rendahnya pemanfaatan media massa (koran, buku, radio, komputer dan internet). Penyebabnya adalah selain karena keterbatasan kepemilikan media informasi dan komunikasi, juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber informasi itu sendiri, dan terbatasnya kemampuan sumber informasi dalam menyediakan informasi pertanian yang relevan, tepat waktu bagi petani. Keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumberdaya manusia, dan manajerial menyebabkan belum dimanfaatkan-kannya secara optimal, dan bijaksana TIK untuk pengelolaan, dan akses inovasi pertanian. Kondisi tersebut juga disebabkan karena belum seluruh kelembagaan penyuluhan dilapangan terfasilitasi sarana dan prasarana dengan layak.

Menyadari berbagai permasalahan di sektor pertanian, strategi dan kebijakan penyuluhan ke depan perlu menaruh perhatian dan komitmen antara lain dengan cara: (1) mengembangkan keterpaduan antara kebutuhan masyarakat dengan pengembangan inovasi yang dilakukan oleh para peneliti, (2) meningkatkan aksesibilitas masyarakat pertanian terhadap informasi dan inovasi, yang didukung oleh teknologi informasi dan peningkatan kompetensi penyuluh secara berkelanjutan yang didukung dengan komitmen insentif biaya penyelenggaraan penyuluhan yang memadai, (3) mendekatkan kebijakan pembangunan pertanian dengan pemahaman masyarakat yang didukung oleh pengembangan kelompok petani sebagai media komunikasi pembangunan dan media belajar, (4) mengurangi kesenjangan antara informasi potensi sumberdaya



pertanian lokal dengan pihak yang berpotensi menjadi investor di sektor pertanian, melalui media komunikasi yang interaktif yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya petani, maupun pihak terkait lainnya, dan (5) meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen pimpinan daerah terhadap pengembangan dan penyelenggaraan penyuluhan.

Kebijakan yang perlu diambil guna penguatan dan pemantapan *cyber extensión* sebagai satu alternatif sistem informasi pertanian, perlu didukung oleh diterbitkannya peraturan/kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang penyuluhan pertanian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian dari tingkat Pusat sampai Kecamatan melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung terbangunnya sistem informasi penyuluhan *cyber extensión*; (2) Peningkatan kualitas SDM penyuluh pertanian dalam kemampuan pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian *cyber extensión* melalui kemampuan penyuluh pertanian dan pelaku utama dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi, kemampuan mengakses informasi dari sumber-sumber informasi yang tepat, baik lokal, nasional maupun internasional, serta kemampuan mengemas kembali informasi yang diakses tersebut menjadi informasi yang dibutuhkan mulai dari tahapan pengumpulan data dan informasi serta publikasi data dan informasi tersebut dalam bentuk berita maupun materi penyuluhan pertanian; (3) *cyber extensión* sebagai *cafeteria* harus dapat mempercepat sampainya informasi ke lapangan, memperluas materi informasi, dan memperdalam substansi informasi agar bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan, sehingga dipandang perlu dilakukan peningkatan kualitas materi informasi penyuluhan melalui pendekatan pelatihan jurnalis kepada penyuluh, dan pelatihan penelusuran data dan informasi yang merupakan kompilasi dari hasil-hasil penelitian, baik penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian maupun hasil kajian pelaku utama di lapangan; (4) Peningkatan kesadaran kritis bagi pengelola sistem informasi penyuluhan *cyber extensión* mulai dari tingkat Pusat sampai Kecamatan dalam bentuk insentif berupa pemberian angka kredit, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya materi penyusunan, pengemasan kembali informasi pertanian, melalui alokasi anggaran secara



rutin terhadap sistem informasi penyuluhan *cyber extensión* guna keberlangsungan sistem tersebut.

3. Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian melalui Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Sumberdaya manusia merupakan sumber daya utama yang menentukan peningkatan kesejahteraan suatu negara. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi tidak memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang relatif lambat. Sedangkan negara yang miskin sumber daya alam tetapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang relatif cepat.

Indonesia termasuk negara yang memiliki populasi yang terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa (Sensus Penduduk BPS, 2010). Indonesia memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan mampu menjadi pendorong ke arah kemakmuran. Penduduk, terutama tenaga kerja yang berkualitas baik, mampu mempercepat proses pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat laju proses pembangunan. Kualitas sumber daya manusia pada era globalisasi saat ini semakin penting seiring dengan tuntutan keterbukaan bagi setiap negara. Konsekuensi yang terjadi adalah persaingan terbuka bagi tenaga kerja lintas negara. Tenaga kerja yang berkualitas akan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, sementara tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan kalah bersaing dan bahkan tersingkir dari pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah dan umumnya akan menempati segmen tenaga kerja dengan penghasilan yang rendah. Sedangkan tenaga kerja dengan kualitas tinggi akan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi, menduduki posisi-posisi penting serta memungkinkan memperoleh penghasilan yang cukup tinggi.

Sumberdaya manusia Indonesia secara regional Asia Tenggara dapat dikatakan masih harus dipacu kualitasnya. Pembangunan di Indonesia harus difokuskan pada pembangunan sumberdaya manusia, karena tiga kelemahan utamanya adalah infrastruktur administrasi, infrastruktur



komunikasi dan sumber daya manusia (*ASEAN Competitiveness Index*, 2012). Dilihat dari jangkauan pendidikan tinggi dan pelatihan, di tingkat dunia, Indonesia pada tahun 2012 berada pada posisi 73, jauh di bawah Singapura yang menduduki posisi 2, Malaysia pada posisi 39 dan Brunei pada posisi 57. Sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang berada pada usia produktif memiliki latar belakang setingkat sekolah dasar yang berkisar 54,62 % (Data Sosial Ekonomi BPS edisi 40, 2013). Dari kondisi ini, maka dapat dipastikan bahwa secara umum penduduk Indonesia belum mampu bersaing dengan negara-negara tetangga lingkup Asia Tenggara. Ketidakkampuan tersebut menjadi sangat krusial, terutama terkait dengan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015.

Salah satu formula untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia adalah standard kompetensi sumberdaya manusia yang pada umumnya dipersyaratkan bagi tenaga kerja pada posisi/jabatan tertentu. Standar kompetensi kerja mengacu pada rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dengan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permenakertrans RI No. 5/2012 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional).

Secara nasional, kompetensi untuk jenis jabatan atau dikenal dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI mencakup rumusan kompetensi untuk berbagai pekerjaan di berbagai sektor. Di Indonesia, saat ini terus diupayakan penyusunan SKKNI untuk berbagai profesi/jabatan dengan prinsip: (a) relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau lapangan usaha, (b) valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah, (c) dapat diterima oleh para pemangku kepentingan, (d) fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, serta (e) mampu ditelusuri dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan metode-metode lainnya yang bersifat *capacity building* (peningkatan kapasitas sumberdaya manusia). Khusus di sektor pertanian, upaya-upaya tersebut



terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian. Badan PPSDMP mengembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian dengan tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang professional yang memiliki daya saing tinggi baik di tingkat lokal maupun internasional dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Standardisasi dan sertifikasi profesi sumberdaya manusia pertanian meliputi aparatur dan non aparatur pertanian, terutama petani dengan mengkaji aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap.

Dalam rangka pengembangan SKKNI sektor pertanian, dirumuskan peta kompetensi sumberdaya manusia pertanian yang mencakup sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Peta kompetensi merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi kerja. Sasaran Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi SDM Pertanian adalah sumberdaya manusia di lingkungan Kementerian Pertanian dan masyarakat umum yang bekerja di sektor pertanian.

Perumusan peta kompetensi didasarkan atas kebutuhan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan di bidang pertanian sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 68/Permentan/OT.140/ 5/2014 tentang Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. Secara garis besar, terdapat dua golongan standarisasi kompetensi berdasarkan fungsi kuncinya, yaitu Standardisasi Kompetensi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Standardisasi Kompetensi Sub Sektor Peternakan.

Tujuan utama dari Standardisasi Kompetensi Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman, Nilai Tambah dan Daya Saing serta Status Kesehatan Tanaman. Standardisasi tersebut memuat fungsi-fungsi kunci antara lain Pengelolaan Produksi Tanaman, Pencegahan Penyebaran OPT/OPTK, Penanganan dan Pengolahan Panen dan Pasca Panen, Penjaminan Mutu Produk serta Penunjang Peningkatan Produksi.



Pada Subsektor Peternakan terdapat Standardisasi Kompetensi Subsektor Peternakan dan Standardisasi Kompetensi Subsektor Kesehatan Hewan. Tujuan utama Standardisasi Kompetensi Subsektor Peternakan Standardisasi Kompetensi Subsektor Peternakan adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas Ternak, Nilai Tambah dan Daya Saing dengan didukung oleh beberapa fungsi kunci yang meliputi Pengembangan Bibit Ternak, Penyediaan Pakan Ternak, Pelaksanaan Budidaya, Penjaminan Mutu Produk serta Penunjang Peningkatan Produksi. Sedangkan Standardisasi Kompetensi Subsektor Kesehatan Hewan terdiri atas dua tujuan utama, yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Hewan, Manusia dan Lingkungan (Paramedik Veteriner) dan Meningkatkan Status Kesehatan Hewan, Manusia dan Lingkungan (Medik Veteriner). Tujuan utama Meningkatkan Status Kesehatan Hewan, Manusia dan Lingkungan (Paramedik Veteriner) memiliki satu fungsi kunci yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (*Zoonosis* dan *Non Zoonosis*). Pada tujuan utama Meningkatkan Status Kesehatan Hewan, Manusia dan Lingkungan (Medik Veteriner) memiliki fungsi-fungsi kunci berupa Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (*Zoonosis* dan *Non Zoonosis*), Penjaminan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Hewan, Pengembangan dan Penjaminan Farmasi Veteriner dan Dietetik Veteriner, Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan, Manajemen Penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta Pengembangan Riset Veteriner.

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, BPPSDMP melalui Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian (Pusdikdarkasi) telah melaksanakan kegiatan standardisasi kompetensi bagi penyuluh pertanian dengan menghasilkan sebanyak 2.205 orang penyuluh pertanian yang tersertifikasi dan 1.947 (3,9% dari total penyuluh pertanian) diantaranya telah dinyatakan kompeten.

Salah satu isu strategis Badan PPSDMP adalah penyelenggaraan standardisasi dan sertifikasi bagi berbagai jabatan fungsional/profesi yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP), baik yang melibatkan aparatur maupun masyarakat luas (non aparatur). Pada Tahun 2013 setidaknya terdapat 8.020 fungsional RIHP yang harus disertifikasi. Jumlah ini antara lain terdiri dari Pengendali Organisme Pengganggu



Tumbuhan (POPT) sejumlah 3.808 orang, medik veteriner 112 orang, pengawas benih tanaman 3.471 orang, pengawas benih ternak 117 orang, paramedik veteriner 472 orang, serta pengawas mutu pakan 40 orang. Jumlah tersebut belum termasuk fungsional-fungsional lainnya seperti penyembelihan halal dan pengawas keamanan pangan segar. Standardisasi dan sertifikasi profesi tersebut harus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja, profesionalisme dan daya saing sumberdaya manusia di sektor pertanian, terutama dalam rangka menghadapi persaingan global.

Standardisasi dan sertifikasi profesi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Secara kelembagaan, Badan PPSDMP telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan mendayagunakan segala potensi yang ada. Unit-unit kerja di bawah koordinasi vertikal maupun binaan Badan PPSDMP harus ditingkatkan peranannya agar dapat berperan sebagai LSP. Salah satu tantangan terbesar terkait hal ini adalah terciptanya balai pelatihan yang mampu menyelenggarakan pelatihan dengan sertifikat kelulusan yang diakui secara internasional. Selain unit kerja pelatihan dan pendidikan, BP3K juga berpotensi sebagai LSP. Peningkatan peran kelembagaan tersebut harus didukung melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Saat ini, masih banyak unit kerja pelatihan dan pendidikan serta BP3K belum layak melakukan uji kompetensi.

Kebijakan standardisasi dan sertifikasi profesi menuntut penguatan kemampuan asesor dan tenaga pendukung lainnya. Terkait hal ini, Badan PPSDMP terus berusaha memperkuat standardisasi kompetensi melalui spesialisasi berbagai pendidikan dan pelatihan di subsektor peternakan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selain itu juga terus berusaha melengkapi sarana prasarana lembaga yang akan berfungsi sebagai LSP, baik yang terkait dengan pembelajaran, pengujian serta pengkajian. Dengan demikian, setiap LSP diharapkan memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh jenis jabatan/profesi yang disertifikasi.



4. Peningkatan Fasilitas Balai Pelatihan Melalui Pelayanan Prima dan Bertaraf Internasional

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pertanian, selain kegiatan penyuluhan dan pendidikan pertanian, Badan PPSDMP juga menyelenggarakan pelatihan pertanian yang ditujukan bagi aparatur maupun non aparatur pertanian. Tujuan akhir dari serangkaian kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian adalah menciptakan sumberdaya manusia siap pakai, professional, inovatif, kreatif dan berwawasan global yang dapat mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis, seiring dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, serta perubahan iklim. Sumber daya manusia ini akan mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, dan berdaya saing serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku pertanian lainnya. Tantangan yang dihadapi angkatan kerja di bidang pertanian pada saat ini adalah kesiapan untuk menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian agar memiliki kompetensi kerja, moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Penyelenggaraan pelatihan pertanian, Badan PPSDMP selalu mengacu pada penerapan pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah *excellent service*, yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik, cepat, akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di instansi pemberi layanan sehingga mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). Unit kerja pelatihan atau balai pelatihan merupakan ujung tombak pelayanan prima kepada masyarakat, pengusaha dan industri serta berorientasi bisnis baik di dalam maupun luar negeri, melalui pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian dan peternakan bagi aparatur.

Balai Pelatihan Pertanian dan Peternakan yang merupakan unit kerja Badan PPSDMP, saat ini berjumlah 10 Unit dan tersebar di seluruh wilayah nusantara, yaitu Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (NBPKH) Cinagara,



Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, BBPP Kupang, Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi dan BPP Lampung.

Salah satu isu strategis terkait balai pelatihan adalah perwujudan pelayanan prima yang berdampak pada peningkatan efektifitas pelatihan, peningkatan kompetensi alumni pelatihan dan tercapainya standar yang diakui nasional maupun internasional. Menghadapi pasar bebas, antara lain yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku mulai tahun 2015, Balai Pelatihan diharapkan mampu menjadi Balai Pelatihan berkelas internasional bahkan dengan sertifikasi internasional untuk program, kelembagaan serta alumni pelatihan dengan didukung oleh SDM yang telah memiliki sertifikat standar kompetensi kerja.

Kondisi balai-balai pelatihan saat ini berbeda-beda dari sisi sarana prasarana, SDM maupun capaiannya. Beberapa Balai Pelatihan sudah memenuhi standar minimal sarana prasarana dan sudah mulai ke tahap pengembangan sedangkan sebagian lainnya belum. Dari sisi SDM, terutama tenaga kediklatan/widyaiswara, hampir 60 persen widyaiswara berlatar belakang pendidikan S2 dengan penyebaran yang kurang merata. Begitupun dengan capaian yang dalam hal ini diwakili oleh jumlah program diklat yang telah terakreditasi. Antara tahun 2007 – 2012, terdapat 80 program diklat teknis yang telah terakreditasi dengan nilai rata-rata B. Penilaian ini didasarkan pada tiga komponen utama, yaitu tenaga kediklatan (45%), program diklat (30%) dan fasilitas diklat (25%). Sementara dari sisi manajemen, semua balai telah berhasil mendapat ISO 9001:2008.

Permasalahan utama dari seluruh balai pelatihan yang ada terletak pada ketersediaan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi meliputi sarana dan prasarana yang terkait dengan praktek pelatihan yang bersifat teknis serta yang terkait dengan alat bantu/media pembelajaran. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengacu pada standar minimal, standar dari sertifikasi yang harus dimiliki dan spesialisasi/core utama balai pelatihan seperti hortikultura, peternakan, mekanisasi maupun spesialisasi lainnya. Kekurangan sarana dan prasarana tidak harus dipenuhi melalui pengadaan oleh balai pelatihan bersangkutan. Dengan berbagai pertimbangan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dapat dilakukan



melalui kerjasama dengan lembaga/instansi lain internal Badan PPSDMP maupun eksternal Badan PPSDMP, baik swasta, pemerintah, pemerintah daerah maupun petani.

Kedua adalah keberadaan ketenagaan fasilitator yang profesional mutlak diperlukan dalam meningkatkan peran dan akreditasi balai pelatihan. Untuk meningkatkan kapasitas balai dalam mengajarkan diklat, para pengajar bukan hanya widyaiswara, tetapi juga narasumber yang kompeten yang berasal dari perguruan tinggi lainnya, badan litbang serta pakar-pakar lainnya. Kompetensi dan keahlian widyaiswara harus ditingkatkan agar mempunyai sertifikat yang diakui internasional. Hal ini menuntut peningkatan kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya.

Peningkatan kapasitas widyaiswara ataupun fasilitator serta tenaga pendukung lainnya dapat dilakukan dengan peningkatan akses terhadap jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi serta berbagai kegiatan yang terkait dengan capacity building baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks ini, bukan hanya ditekankan pada peran widyaiswara ataupun fasilitator serta tenaga pendukung lainnya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemberi manfaat. Dengan demikian, widyaiswara ataupun fasilitator serta tenaga pendukung lainnya tidak selalu sebagai peserta berbagai kegiatan ataupun forum, tetapi juga sebagai narasumber/tenaga ahli. Motivasi widyaiswara ataupun fasilitator dapat dipacu melalui berbagai kegiatan penelitian maupun pengkajian seperti kaji widya, perlombaan karya tulis dan fasilitasi berbagai hasil karya tulis/penelitian/ kajian agar dimuat di berbagai bulletin dan media informasi lainnya.

Ketiga adalah dalam menerapkan manajemen penyelenggaraan diklat yang kompeten. Setiap balai pelatihan harus memiliki sertifikasi berupa Sistem Manajemen Mutu standar ISO 9001: 2008. Selain itu, akreditasi program pelatihan juga harus terus ditambah dan ditingkatkan nilainya menjadi A, sehingga mampu “dijual” di masyarakat, terutama berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian. Manajemen penyelenggaraan pelatihan mencakup tahapan penyelenggaraan pelatihan mulai dari identifikasi sampai evaluasi pasca pelatihan serta aspek kurikulum, metode, durasi dan penunjang lainnya seperti pelayanan akomodasi dan



konsumsi. Sistem yang diterapkan adalah Sistem Pelatihan Berbasis Kinerja dan Daya Saing yang mengarah pada pemenuhan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sasaran pelatihan meliputi aparatur dan non aparatur pertanian serta anggota masyarakat lainnya seperti siswa sekolah. Sasaran pelatihan ditetapkan melalui identifikasi kebutuhan latihan yang mencakup persyaratan peserta serta jenis materi yang benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya, selama penyelenggaraan maupun setelah penyelenggaraan pelatihan perlu dilakukan evaluasi yang mencakup aspek ketenagaan, manajemen, serta unsur pelatihan lainnya. Sebagai gambaran, guru atau dosen dapat menjadi peserta pelatihan dan sebaliknya, widyaiswara dapat disertakan pada berbagai kegiatan ilmiah di STPP seperti seminar hasil penelitian. Selain itu, program dan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antar unsur pelatihan, penyuluhan, pendidikan serta sertifikasi dan standardisasi profesi pertanian perlu dilaksanakan. Kegiatan terintegrasi ini antara lain dapat diwujudkan dalam konteks pembangunan kawasan pertanian.

Lingkup materi dan kurikulum pelatihan meliputi seluruh subsektor pertanian, dari budidaya sampai pemasaran serta dukungan lainnya seperti penyuluhan dan manajemen. Di antara lingkup materi yang cukup luas tersebut, setiap balai pelatihan memiliki spesialisasi/core masing-masing dengan program pelatihan yang handal dan terakreditasi. Kurikulum dan durasi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan tujuan dan jenis pelatihan. Pelatihan fungsional dan teknis mengalokasikan waktu praktek yang lebih banyak dibanding pelatihan manajemen, (mencapai 70-80%). Untuk pelatihan dalam bentuk magang, memerlukan waktu yang lebih lama dan sebagian besar bentuk pembelajaran adalah praktek/di lapangan.

Tempat penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan diluar balai pelatihan dengan pertimbangan kesesuaian dengan tujuan dan materi pelatihan serta efisiensi. Di tingkat petani, balai pelatihan membina Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang merupakan lembaga pelatihan yang dikelola oleh petani yang membagikan ilmu dan pengalaman kepada petani lainnya. Peserta pelatihan P4S antara lain petani, penyuluh ataupun guru. Pelatihan di P4S umumnya lebih banyak praktek. Mengingat fungsi P4S yang potensial sebagai tempat pelatihan petani dan dapat



memperluas kapasitas balai pelatihan, maka Badan PPSDMP terus membina dan berusaha menumbuhkembangkan P4S melalui berbagai kegiatan fasilitasi yang disesuaikan dengan kelas P4S, yaitu pemula, madya dan pratama. Selain memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk pelatihan dan permagangan, balai pelatihan juga harus mampu memberikan jasa konsultasi dan pembinaan melalui fasilitasi dan penyelenggaraan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), yang secara periodik membina petani/tenant agar usahatani yang dijalankan dapat maju dan berkembang.

Menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta, dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi salah satu tugas utama balai sekarang ini, mengingat keterbatasan anggaran dan SDM berkualitas. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama penyelenggaraan, sarana prasarana serta ketenagaan sesuai dengan tugas fungsinya. Manfaat kerjasama yang diharapkan bukan hanya akan dirasakan oleh balai pelatihan, tetapi lebih luas ditujukan untuk kemajuan usaha agribisnis yang dijalankan petani.

Kerjasama dalam negeri diarahkan untuk mendukung pencapaian target nasional dan ketahanan pangan serta memperluas jaringan. Beberapa instansi yang potensial sebagai mitra kerjasama selain unit kerja di bawah Badan PPSDMP antara lain berbagai badan pengkajian, penelitian, dan pengembangan, lembaga pelatihan, serta swasta dan instansi lainnya yang bermaksud memanfaatkan sumberdaya yang ada. Sedangkan kerjasama luar negeri dilakukan sebagai sarana transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi antar negara dalam kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Dampak kerjasama tersebut diharapkan dapat mengangkat citra balai pelatihan beserta widyaiswara ataupun fasilitator di dunia internasional. Dengan demikian diharapkan balai pelatihan dipercaya dan menjadi referensi tempat pelatihan dengan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional.

5. Pengembalian Minat Generasi Muda Di Bidang Pertanian melalui Kesempatan Pendidikan Bagi Anak Petani Berprestasi

Ditinjau dari peranannya dalam sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan serapan tenaga kerja, sumbangan PDRB sektor



pertanian sekitar 15,04%, dengan menanggung lebih dari 36,42% tenaga kerja dapat dikatakan memiliki peranan yang tidak proporsional (BPS, Februari 2014). Rendahnya sumbangan PDRB ini antara lain dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian, yang menyebabkan lambatnya adopsi berbagai teknologi tepat guna dan minimnya pemanfaatan peluang-peluang untuk meningkatkan produktivitas.

Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu berada pada usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, sebanyak 11,5% tenaga kerja di sektor pertanian sebagian besar diisi oleh tenaga kerja yang berusia antara 40 – 44 tahun, dan disusul sebanyak 11,0% tenaga kerja kelompok usia 44 - 45 tahun. Selanjutnya dari sisi pendidikan, berdasarkan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) BPS tahun 2012, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat sekolah dasar mencapai 74,5%, disusul oleh lulusan sekolah menengah pertama sebesar 15,7% dan lulusan sekolah menengah atas sebesar 9,15%. Kondisi ini sangat timpang dengan ketenagakerjaan pada sektor industri pengolahan dan jasa. Pada sektor industri pengolahan sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 14,8% dan pada berbagai sektor jasa sebagian besar tenaga kerja berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas dengan proporsi 33,4%. Ketimpangan ini yang menyebabkan perbedaan pendapatan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa.

Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa diperlukan untuk mengurangi beban tenaga kerja di sektor pertanian. Namun perpindahan tersebut idealnya proporsional dalam hal umur dan tingkat pendidikan sehingga tetap ada regenerasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS antara tahun 2008 sampai tahun 2012, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan. Namun, penurunan pertumbuhan terbesar justru pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 9,10% per tahun.

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, menjadi faktor utama penyebab sektor



pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih tertarik dengan sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung disetujui oleh sebagian petani yang tidak menghendaki generasi penerusnya untuk menjadi petani juga. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Badan PPSDMP sebagai salah satu lembaga yang berfungsi mencetak sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan, mempunyai tanggungjawab moral dalam mempertahankan generasi muda untuk terus tertarik dan bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu langkah-langkah kongkrit perlu dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di mulai dari sekolah menengah tentang dunia pertanian yang menguntungkan dan menyenangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan tenaga generasi muda yang kompeten. Penyelenggaraan berbagai kegiatan secara terus-menerus dan berorientasi praktek langsung di lapangan seperti teknis berbudidaya sampai kepada pasca panen dan pemasaran, diberikan untuk membekali generasi muda agar mampu menjadi tenaga kerja yang produktif, inovatif dan berdaya saing, yang mempunyai sikap kepemimpinan, manajerial dan jiwa kewirausahaan.

Salah satu upaya mencetak tenaga muda di sektor pertanian antara lain diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan pertanian yang mampu diakses oleh seluruh masyarakat, terutama oleh anak atau keluarga petani yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Terkait hal ini, Badan PPSDMP memandang perlu untuk menyelenggarakan beasiswa pendidikan kepada putra-putri petani yang berprestasi, untuk melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan atau melalui Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).

Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan (SMK-PP) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja teknis menengah kejuruan pertanian yang handal, yang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Lulusannya harus mengisi peluang kerja di tingkat lapangan, baik



sebagai petani maju atau wirausahawan muda pertanian. Kurikulum pendidikan pada proses pembelajarannya harus banyak melaksanakan praktek, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kurikulum dirancang untuk mencetak generasi muda yang menguasai ilmu kewirausahaan dan manajerial. Sedangkan materi yang diajarkan meliputi teknis tanaman pangan/hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan penyuluhan.

Pendidikan tinggi bidang penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP melalui STPP ditujukan untuk mencetak penyuluh pertanian yang professional dan dapat memenuhi kebutuhan di lapangan. Beberapa jurusan yang ditawarkan STPP antara lain meliputi jurusan tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Kurikulum dirancang dengan menggabungkan antara teori dengan praktek penyuluhan dan pendampingan sehingga lulusan diharapkan memiliki keahlian khusus dan mampu menerapkan metode penyuluhan yang tepat.

6. Penerapan Good Governance (Tata Kelola yang Baik)

Dalam rangka menghadapi kondisi yang semakin dinamis, global dan penuh persaingan, kinerja Badan PPSDMP perlu menerapkan tata kelola/*good governance* yang baik dengan didukung oleh sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Penerapan tersebut bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektifitas, penyajian data, perumusan rencana, program dan kerjasama serta anggaran berbasis kinerja, (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan, (3) meningkatkan pengelolaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penataan organisasi ketatausahaan serta kepegawaian berbasis kompetensi, serta (4) meningkatkan efektifitas sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan serta kehumasan, dan (5) meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Tata kelola dalam hal ini mengacu pada proses pengambilan keputusan dan proses implementasi keputusan dengan memperhatikan stakeholder terkait baik dari internal maupun eksternal organisasi/lembaga. Tata kelola yang baik memiliki delapan ciri utama,



yaitu partisipatif, beorientasi pada kesepakatan/*consensus*, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, pemerataan serta inklusif dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola yang baik dapat berdampak pada penurunan tingkat korupsi, terakomodirnya kepentingan seluruh pihak, termasuk kaum minoritas serta responsif terhadap kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

Sistem administrasi dan manajemen perlu memanfaatkan TIK yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan sumber daya lainnya, meningkatkan transparansi serta pembentukan jejaring baru. TIK harus dimanfaatkan mulai dari perencanaan, penataan organisasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta fungsi koordinasi penyelenggaraan program dan kegiatan. Pemanfaatan ini terlihat dari diterapkannya sistem-sistem secara elektronik seperti e-planning, e-monev, e-SIIP (Sistem Informasi Pelatihan Pertanian) serta sistem-sistem integrasi data lainnya baik antar pelaku internal Badan PPSDMP maupun antara Badan PPSDMP dengan pengguna jasa dan masyarakat. Penerapan TIK juga memungkinkan Badan PPSDMP memperoleh respon dan tanggapan dari pengguna jasa dan masyarakat secara cepat dan menyeluruh.

Peningkatan kinerja yang baik dan berkesinambungan mutlak diupayakan Badan PPSDMP agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian berbagai standar dan sertifikasi yang telah ditetapkan dan mendapat legitimasi harus dipenuhi oleh kelembagaan di bawah koordinasi Badan PPSDMP, individu yang bernaung di bawah Badan PPSMP serta individu maupun lembaga yang menjadi sasaran kegiatan Badan PPSDMP. Mulai dari perencanaan, target-target kinerja dan standar-standar secara kuantitatif maupun kualitatif harus ditetapkan baik untuk unit kerja di pusat maupun unit kerja di daerah.

Pengelolaan sumber daya yang ada, baik SDM, anggaran dan sumber daya lainnya menentukan kinerja organisasi. Sistem administrasi dan manajemen yang diterapkan Badan PPSDMP harus menjamin dan mengusahakan kualitas sumber daya yang baik yang berperan sebagai *input* serta mekanisme/proses pemanfaatan ataupun mobilisasi sumber daya tersebut. Dari keseluruhan sumber daya tersebut, SDM merupakan sumber daya yang paling penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan



keseluruhan administrasi dan manajemen. Proses rekrutment yang menekankan pada kompetensi diterapkan sebagai upaya untuk mendapatkan SDM yang berkompeten sesuai dengan jabatannya. Rekrutmen harus dilakukan secara transparan dengan metode CAT ataupun metode lain dan disertai dengan *assessment* yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Sistem rekrutmen seperti ini diharapkan akan menghasilkan SDM yang berkompeten dan dapat menjalankan tugas teknis serta tugas-tugas manajerial lainnya.

Perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembiayaan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pengadministrasian penggunaan anggaran serta sarana dan prasarana harus sistematis, dan transparan. Sedangkan untuk menjamin kesesuaian proses dengan perencanaan, maka monitoring, evaluasi dan pelaporan harus dilakukan secara periodik, terstruktur dan meliputi seluruh aspek. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai aspek pendukung, sistem administrasi dan manajemen diharapkan mampu menciptakan sinergitas antar komponen internal maupun eksternal. Segala unsur yang dimiliki Badan PPSDMP ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Alokasi sumber daya (SDM, anggaran dan sarana prasarana) dirancang untuk mencapai kinerja yang optimal dari seluruh unit kerja lingkup Badan PPSDMP. Sebagai gambaran, guru atau dosen dapat menjadi peserta pelatihan dan sebaliknya, widyaiswara dapat disertakan pada berbagai kegiatan ilmiah di STPP, seperti seminar hasil penelitian. Selain itu, program dan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antar unsur penyuluhan, pelatihan, pendidikan serta sertifikasi dan standardisasi profesi pertanian perlu dilaksanakan.

Sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, Badan PPSDMP menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah maupun swasta. Badan PPSDMP dapat juga mendorong pembentukan lembaga/instansi bahkan komunitas yang nantinya potensial sebagai mitra kerjasama seperti jejaring alumni pendidikan atau pelatihan serta beberapa komunitas di sektor pertanian.



BAB II

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT)





II. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (SWOT)

A. Kekuatan (*Strenght*)

1. Adanya peraturan perundangan lingkup pertanian. Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peningkatan modal sosial, dengan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, serta memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.

Selain Undang-Undang No. 16 tahun 2006, terdapat beberapa Peraturan Perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian, yaitu:

- (1) PP No. 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - (2) Permentan No. 273/Kpts/OT. 160/4/2007 tentang Pedoman Pembiayaan Kelembagaan Petani;
 - (3) Permentan No. 61/Permentan/OT. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya dan Swasta;
 - (4) Permentan No. 01/Permentan/OT. 140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP; dan
 - (5) Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Tersedianya lembaga penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian. Dukungan lembaga penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian ada di tingkat pusat dan daerah. Lembaga di tingkat pusat adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan



PPSDMP), yang terdiri dari empat Unit Eselon II, yaitu: (1) Pusat Penyuluhan Pertanian; (2) Pusat Pelatihan pertanian; (3) Pusat pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi pertanian; serta (4) Sekretariat Badan.

Disamping organisasi yang ada di pusat, Badan PPSDMP juga memiliki sembilan (9) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pendidikan pertanian dan sepuluh (10) UPT Bidang pelatihan Pertanian. Kesembilan UPT Bidang Pendidikan Pertanian adalah:

- (1) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan;
- (2) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor;
- (3) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang;
- (4) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang;
- (5) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa;
- (6) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari;
- (7) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa;
- (8) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru; dan
- (9) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang.

Sedangkan UPT Bidang Pelatihan Pertanian meliputi:

- (1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi;
- (2) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
- (3) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
- (4) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
- (5) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;
- (6) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
- (7) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- (8) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara;
- (9) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi; dan
- (10) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung.

Lembaga di tingkat daerah yang dibina oleh Badan PPSDMP adalah seperti Tabel 9 berikut:



Tabel 9. Jumlah lembaga tingkat daerah yang dibina oleh Badan PPSDMP

No.	UPT/UPTD	Jumlah
1.	STPP	6
2.	SPP pemerintah daerah dan swasta	81
3.	SMK-PP Negeri	3
3.	Balai Diklat Pertanian (BDP) Daerah	8
4.	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)	8
5.	Balai Pelatihan Pertanian (BPP)	2
6.	Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)	891
7.	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian Tingkat Provinsi	34
8.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Lingkup Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	413
9.	Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Tingkat Kecamatan	5.232

Sumber : Badan PPSDMP dalam Angka (2014)

3. Tersedianya aparatur pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Sampai tahun 2013, pelaksanaan tugas fungsi Badan PPSDMP didukung oleh tenaga struktural dan fungsional berikut:



Tabel 10. Jumlah tenaga struktural dan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP

No	Tenaga Struktural dan Fungsional	Jumlah (orang)	
1.	Aparat Pusat dan UPT Pusat:	2.290	
	• Aparat Pusat	347	
	• Struktural		323
	• Fungsional (Penyuluh PNS)		24
	• Aparat UPT Pusat	1.956	
	• Struktural		
	○ Tenaga Kediklatan		1.345
	○ Tenaga Kependidikan		514
	• Fungsional		
	○ Pelatihan		
	▪ Widyaiswara		194
	○ Pendidikan		
	▪ Guru (SMK PPN dan SMK PP Binaan)		553
	▪ Dosen		205
2.	Tenaga Fungsional yang dibina	63.728	
	• Penyuluh Pertanian PNS		27.485
	• Penyuluh Pertanian Honorer		1.251
	• Penyuluh Pertanian Swadaya		13.169
	• Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian		20.479

Sumber : Badan PPSDMP dalam Angka (2014)

4. Kearifan lokal dalam mengelola SDA secara bijaksana. Masyarakat Indonesia telah dikenal memiliki budaya dan adat istiadat yang beragam, termasuk diantaranya kearifan lokal. Masyarakat adat/lokal telah memiliki cara/metode yang telah diwariskan dari leluhur mulai dari mengidentifikasi, menilai dan memformulasikan permasalahan dan solusinya berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Permasalahan



ini meliputi lingkungan, sosial, kultural, dan ekonomi. Masyarakat juga mampu membangun visi dan aspirasi dalam menetapkan prioritas, intervensi, rencana, tata kelola, monitoring dan bahkan pemilihan teknologi yang tepat.

5. Budaya kerja keras dan gotong royong. Budaya kerja keras dan gotong royong merupakan salah satu perwujudan modal sosial yang melekat pada masyarakat Indonesia. Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan pembangunan partisipatif. Basis modal sosial adalah *trust*, *networking*, dan norma. Modal sosial juga sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan. Modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas, menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas, mengembangkan solidaritas, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas, memungkinkan pencapaian bersama, dan membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.. Hilangnya modal sosial tersebut dapat memicu konflik sosial yang akan sulit untuk diselesaikan. Selain itu, dari segi ekonomi kuatnya modal sosial akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dengan berkurangnya *transaction cost*.
6. Jumlah petani dan tenaga kerja di perdesaan. Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Bagian terbesar dari tenaga kerja pertanian berada di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura diikuti oleh sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor jasa pertanian. Potensi pertanian akan menjadi optimal bila disertai dengan peningkatan kualitas petani dan tenaga kerja di perdesaan.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian memiliki peran strategis untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Namun, kondisi umum SDM saat ini masih menghadapi permasalahan, yaitu:



1. Rendahnya tingkat pendidikan petani. Pendidikan petani yang rendah dapat menghambat proses pembangunan pertanian. Banyaknya petani yang berpendidikan setingkat SD menghambat akses dan penguasaan informasi dan teknologi. Hal ini akan menyebabkan sektor pertanian Indonesia ketinggalan dibanding negara lain dan produk yang dihasilkan juga tidak mampu bersaing dan akhirnya berdampak pada pendapatan petani yang rendah.
2. Pola usaha tani yang dikelola masih bersifat subsisten dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah kecilnya penguasaan lahan oleh sebagian besar petani. Petani dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha mencapai 54% tersebut akan sulit untuk mencapai skala usaha yang ekonomis.
3. Keterbatasan aksesibilitas petani terhadap permodalan, informasi dan teknologi. Sebagai akibat dari rendahnya produktivitas, para petani dihadapkan pada rendahnya aksesibilitas mereka terhadap kredit, informasi, teknologi dan infrastruktur. Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pengembangan/perluasan usaha agribisnis.
4. **Rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian.** Jumlah petani muda cenderung menurun yang dindikasikan oleh usia petani yang umumnya sudah lanjut dan tidak ada minat para generasi muda untuk terjun pada bidang pertanian. Hal ini akan mempengaruhi adopsi teknologi dan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi.
5. **Jumlah dan kompetensi tenaga fungsional belum memadai (penyuluh, dosen/guru dan widyaiswara).** Jumlah penyuluh PNS yang ada masih jauh dari kebutuhan pelayanan penyuluhan satu desa satu penyuluh. Saat ini penyuluh yang mendekati usia pensiun mencapai 49%. Penurunan jumlah penyuluh akan berpengaruh pada jangkauan jumlah petani yang difasilitasi. Rendahnya insentif bagi penyuluh dan adanya tawaran jabatan lain seiring dengan penerapan otonomi daerah menyebabkan banyak penyuluh yang beralih status/jabatan. Terkait dengan dosen, guru dan widyaiswara, jumlah dan kualitasnya belum memadai. Secara ideal seorang guru, atau dosen atau widyaiswara mengajarkan satu mata ajaran/kuliah dengan kedalaman



pengetahuan yang memadai. Selain itu, sebagian penyuluh, dosen, guru maupun widyaiswara belum tersertifikasi.

6. **Belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian.** Kemitraan antara petani dan pelaku usaha belum optimal sehingga usahatani yang dijalankan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Petani masih berorientasi pada skala usaha individual, dan belum mengarah pada skala korporasi. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mendapatkan jaringan yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan maupun untuk pengembangan usaha.
7. **Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan SDM Pertanian.** Investasi sumber daya manusia dalam pembangunan pertanian biasanya belum tampak hasilnya dalam waktu satu atau dua tahun. Bagi kepala daerah yang tidak begitu perhatian dengan investasi sumber daya manusia, dengan masa kekuasaan yang hanya lima tahunan, perannya dalam pengembangan SDM tidak akan tampak pula.
8. **Lambatnya alih teknologi dan informasi.** Latar belakang pendidikan petani yang rendah mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dan informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk mencerna informasi atau pengetahuan, memahami prinsip kerja alat mesin pertanian sampai dengan menggunakannya serta kurang dapat mengakses informasi. Akibatnya, banyak teknologi baru yang belum banyak dimanfaatkan petani. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan hilangnya peluang-peluang yang menguntungkan bagi petani.
9. **Terbatasnya sarana dan prasarana.** Minimal kebutuhan sarana dan prasarana Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)/Balai Pelatihan Pertanian (BPP), SMK-PP, dan STPP tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 49/Permentan/ OT.140/9/2011, sedangkan minimal kebutuhan sarana dan prasarana BP3K tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/OT.140/4/2012. Secara umum, lembaga-lembaga tersebut belum memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarannya. Dengan kondisi ini, maka proses belajar



mengajar maupun transfer pengetahuan dan keterampilan lainnya tidak berjalan optimal.

10. **Kurangnya kredibilitas.** Kredibilitas terdiri dari beragam nilai seperti kepercayaan yang tinggi, kepemimpinan mumpuni, karakter pribadi, kompetensi, kepedulian, dan komitmen tinggi. Kredibilitas merupakan ukuran utama untuk menilai unggul tidaknya SDM dalam suatu persaingan. Semakin tinggi nilai unsur-unsur tersebut semakin tinggi kredibilitas seseorang serta semakin banyak pengguna produk ataupun jasa yang dihasilkan yang merasa puas. Kredibilitas ini tidak hanya melekat pada individu tetapi juga melekat pada lembaga/individu. kredibilitas individu akan menentukan kredibilitas instansi tempat individu tersebut beraktivitas.
11. **Rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran.** Orientasi pertama sebagian besar petani masih pada bagaimana menghasilkan produk sebanyak-banyaknya. Pemahaman petani tentang aspek pemasaran seringkali masih terbatas. Kegiatan pemasaran yang dilakukan petani baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa melakukan perlakuan khusus. Perlakuan tambahan seperti pemrosesan dan persiapan untuk meningkatkan nilai jual komoditas belum banyak dilakukan. Selain itu, dalam memasarkan komoditas pertanian, petani banyak mengandalkan pedagang pengumpul yang datang ke desa ketika musim panen, sehingga petani tidak mengetahui harga pasaran yang sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan petani kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan dari komoditas yang dihasilkannya.
12. **Lemahnya kapasitas dan belum efektifnya kinerja kelembagaan kelompok tani.** Lemahnya kapasitas kelembagaan petani menyebabkan posisi tawar kelompok tani rendah dan kelompok tidak mandiri. Kelompok tani yang belum memiliki posisi tawar yang menguntungkan dalam menjalankan usahatani akan memperoleh pendapatan yang rendah.
13. **Belum berkembangnya kelembagaan petani yang berorientasi pada aspek ekonomi petani.** Sebagian besar kelembagaan petani belum melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar.



Kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan masih bersifat individual. Kelembagaan petani (Gapoktan/kelompok tani) belum secara sungguh-sungguh berupaya mengumpulkan komoditas/ produk untuk dipasarkan secara bersama-sama/berkelompok. Hal ini karena penjualan ke penebas/tengkulak dinilai lebih mudah dan praktis. Di samping itu belum berkembangnya pemasaran secara kolektif juga disebabkan karena rendahnya semangat dan jiwa kewirausahaan pengurus kelembagaan petani.

14. **Masih rendahnya minat untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan petani.** Kesadaran petani untuk membentuk dan mengembangkan organisasi petani dan organisasi pengusaha skala kecil masih rendah. Belum berkembangnya organisasi untuk advokasi aspirasi politik petani dan pengusaha kecil dapat menjadi penyebab dari kegagalan kebijakan.

C. Peluang (*Opportunity*)

1. Pemanfaatan sumberdaya manusia demikian besar dan masih terus bertambah. Jumlah penduduk yang sangat besar dan daya beli yang tinggi merupakan potensi pasar domestik karena dapat menstimulasi peningkatan produksi sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Peningkatan produksi dan nilai tambah. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan standar produk yang semakin tinggi membawa konsekuensi permintaan produk pertanian yang semakin meningkat dengan nilai tambah yang tinggi. SDM sebagai pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai (modal sosial khas Indonesia) harus memiliki kompetensi yang tinggi agar dapat memanfaatkan peluang tersebut.
3. Kemajuan IPTEK, global untuk pengembangan inovasi pertanian (melalui pengembangan sistem inovasi pada perguruan tinggi). Inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan ragam produk sesuai kebutuhan pasar serta meningkatkan nilai tambah, menurunkan biaya produksi dan menerapkan tata kelola usaha pertanian yang baik untuk mewujudkan kemandirian pertanian.



4. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian. Potensi lahan produktif untuk pengembangan pertanian cukup luas (30 juta Ha). Apabila lahan tersebut dapat dimanfaatkan optimal, maka produksi sektor pertanian akan meningkat.
5. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kesatuan pasar dan basis produksi yang tercipta akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Apabila barang, jasa dan SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, maka pangsa pasar barang, jasa serta tenaga kerja Indonesia akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

D. Tantangan (*Threath*)

1. Minat di bidang pertanian. Rendahnya minat generasi muda dalam bidang pertanian merupakan masalah dalam pembangunan pertanian, dan ini merupakan ancaman karena siapa yang akan menjadi penerus pertanian kita jika para generasi mudanya menjauhi dunia pertanian. Kemungkinan bisa terjadi bahwa dalam 5 atau 10 tahun lagi kebutuhan pangan kita akan sangat bergantung pada negara lain. Akan tetapi, hal ini merupakan tantangan bagi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, terutama dalam menciptakan petani muda melalui Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP).
2. Tantangan dalam bidang penyuluhan adalah sinergitas antara dinas teknis pertanian, penyuluhan, dan BPTP; terbatasnya sarpras penyuluhan; dan terbatasnya petani yang menjadi anggota poktan/gapoktan.
3. Tantangan dalam bidang pelatihan adalah optimalisasi Eselon I dalam pemanfaatan balai pelatihan, pengembangan jejaring kerjasama pelatihan lintas sektor dan dunia usaha/industri, dan persaingan balai pelatihan dengan institusi sektor lain/swasta.
4. Tantangan dalam bidang Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian adalah rendahnya minat PNS melanjutkan ke STPP dan lulusan SLTP ke SMK-PP, komitmen pemda lemah, belum ada



- Perguruan Tinggi RIHP, dan Eselon I lain belum optimal memanfaatkan keberadaan STPP.
5. Tantangan dalam Sekretariat Badan PPSDMP adalah *linkage* antara penelitian-diklat – penyuluhan, standardisasi mutu, *networking* dan pemenuhan kebutuhan pasar/*stakeholders*.
 6. Perubahan Iklim global. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian karena berdampak serius terhadap lingkungan, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Disamping itu petani masih sangat minim memahami proses adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan iklim yang berdampak sistematis bagi hasil pertanian. Kurangnya informasi utuh tentang perubahan iklim dapat menghambat optimalisasi hasil produk pertanian dalam skala makro. Sehingga, petani kita masih sering mengalami risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir dan ledakan hama.
 7. Ketahanan pangan dan pertumbuhan penduduk serta urbanisasi. Sebagai negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, langkah Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan bukanlah tanpa hambatan. Urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk membawa dampak terhadap tata kelola bidang agro secara keseluruhan. Untuk itu, perlu keseriusan, dedikasi, komitmen dan tanggung jawab semua pihak untuk dapat mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional, baik untuk saat ini dan bagi generasi penerus. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi serta ketergantungan pada impor pangan menimbulkan ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia.
 8. Inovasi IPTEK semakin kompleks dan berkelanjutan. Tidak dimanfaatkannya kemajuan IPTEK untuk pengembangan sistem inovasi pada perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi pertanian pada akhirnya berdampak pada penurunan daya saing. Perkembangan IPTEK yang cukup pesat jika tidak diimbangi dengan kualitas SDM Pertanian yang tinggi, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam mengambil manfaat dari kemajuan teknologi tersebut.
 9. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi



pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negara-negara tetangga.

10. Perlindungan Petani. Merupakan upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Adapun Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani ini merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Menghadapi era perdagangan bebas dewasa ini, transformasi kelembagaan tani menjadi kelembagaan ekonomi petani tidak terelakkan lagi, sejalan dengan tuntutan untuk melakukan penguatan organisasi usaha yang berbadan hukum. Peningkatan status kelembagaan ini dapat meningkatkan kredibilitas petani, seperti dalam konteks hubungan **dengan** lembaga keuangan atau perbankan terkait dukungan permodalan untuk usaha yang lebih komersial dan upaya memenangi persaingan. Namun untuk menuju kelembagaan ekonomi petani mendapat tantangan dan ujian yang sangat berat. Hal ini karena kelembagaan petani kita secara umum belum siap untuk menghadapi perdagangan bebas. Ketidaksiapan tersebut dapat kita ketahui dari berbagai aspek antara lain **aspek psikososial, aspek profesionalisme, aspek teknologi, aspek pola pikir, aspek sumberdaya manusia dan aspek legal formal**. Walaupun tidak secara mutlak dikatakan belum siap sama sekali.



BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN





III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Badan PPSDMP) memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan PPSDMP menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi Badan PPSDMP.

Dalam mendukung Visi Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, maka Badan PPSDMP dengan memperhatikan tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, menetapkan visi: ***“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan”***.



Tabel 11. Pokok-Pokok Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Pokok-Pokok Visi	Makna Visi
SDM pertanian yang Profesional	sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya.
SDM Pertanian yang Mandiri	sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.
SDM Pertanian yang Berdaya Saing	sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.
Bioindustri	Menyediakan bahan baku industri dengan meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai bagian upaya meningkatkan manfaat dan diversifikasi produk turunan
Berkelanjutan	Melanjutkan kebijakan, program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi

B. Misi

Kementerian Pertanian menetapkan 4 (empat) misi yaitu: (1) Mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; (3) Mewujudkan kesejahteraan petani; dan (4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan berdaya saing berorientasi bioindustri berkelanjutan, serta mengacu pada pada misi Kementerian Pertanian, khususnya pada misi Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian



bioindustri menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka Badan PPSDMP menetapkan misi sebagai berikut:

- (1) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan;
- (2) Memperkuat sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel;
- (3) Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing;
- (4) Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

C. Tujuan

Sejalan dengan tujuan Pembangunan Pertanian 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu: (1) Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian; (3) Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy; (4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; dan (5) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan PPSDMP adalah:

- (1) Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;
- (2) Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
- (3) Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian;
- (4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

D. Sasaran

Sasaran merupakan indikator kinerja suatu lembaga dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam membangun pertanian di Indonesia, selama lima tahun kedepan, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu: (1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan



bioenergy; (5) Peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP menetapkan sasaran:

- (1) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani
- (2) Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian
- (3) Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, dan
- (4) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2015-2019 ditampilkan pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2015-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
<i>Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional, Mandiri Dan Berdaya Saing Berorientasi Bioindustri Berkelanjutan</i>	1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani	1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani
	2. Memperkuat sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel	2. Meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian
	3. Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi dan daya saing	3. Meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, dan
	4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel	4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen	4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam lima tahun kedepan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden/ Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda prioritas di bidang pertanian berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut terdiri atas dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.



- (1) Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda 6 Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah: (a) meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif; (b) meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor; dan (c) berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, manggis, nanas, manggis, salak, dan kentang.

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, arah kebijakan Kementerian Pertanian difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi: (a) Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat; (b) Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati; (c) Pengembangan agroindustri perdesaan; (d) Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran; (e) Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar; (f) Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

- (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (3) mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.



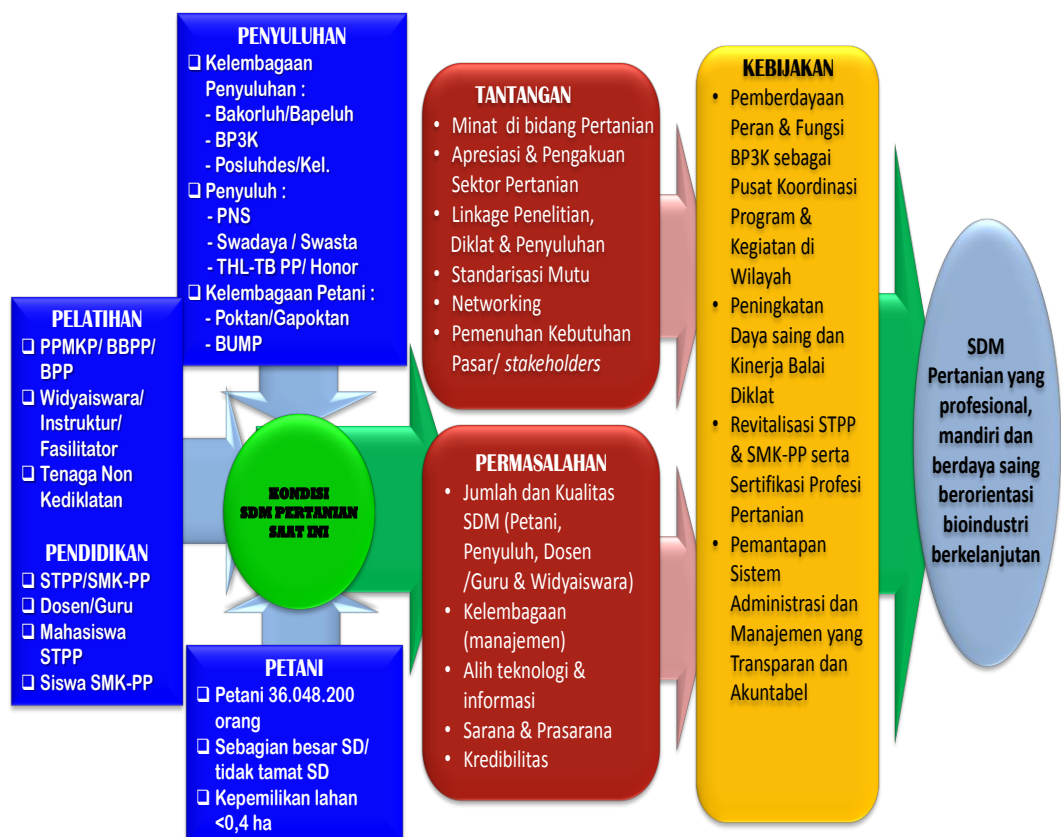
Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- (a) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
- (b) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- (c) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- (d) Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- (e) Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- (f) Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- (g) Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung arah kebijakan umum kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Badan PPSDMP adalah: (1) optimalisasi peran penyuluhan dalam pendampingan program swasembada pangan di tingkat BP3K dan WKPP; (2) peningkatan daya saing dan kinerja balai diklat; (3) revitalisasi STPP dan SMK-PP serta sertifikasi profesi pertanian; dan (4) pemantapan sistem administrasi



dan manajemen yang transparan dan akuntabel. Fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, dilakukan melalui Peningkatan Efektifitas Penyuluhan dalam Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; penyuluh dan petugas teknis; dan aparatur pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian. Arah kebijakan Badan PPSDMP dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Arah kebijakan Badan PPSDMP



B. Strategi

Strategi Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasarannya, menetapkan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) Penguatan kelembagaan petani; (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy; dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantina; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi public; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; serta (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Berdasarkan rincian dari Tujuh Strategi Utama dan Sembilan Strategi Pendukung Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), maka strategi Badan PPSDMP meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan petani; dan (2) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Dalam mewujudkan strategi Kementerian Pertanian yang terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi yang akan dilakukan oleh Badan PPSMDP adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pemanjapan Sistem Penyuluhan Pertanian:

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemanjapan sistem penyuluhan pertanian, adalah:

- a. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis, penyuluhan dan balai penelitian
- b. Penguatan BP3K sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan
- c. Pemberdayaan penyuluh PNS, THL-TBPP dan Swadaya/swasta
- d. Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP
- e. Pengembangan dan penyebaran informasi/ materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian
- f. Penguatan program dan kerjasama
- g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana.



Adapun penjabaran langkah operasional dijabarkan pada tahap sebagai berikut:

a. Meningkatkan sinergitas pemberdayaan penyuluhan antar dinas teknis, penyuluhan dan balai penelitian

- (1) Membentuk Tim Supervisi Terpadu antara Balitbang, BPPSDMP, PSP, PPHP, BKP dan Ditjen Teknis/Koordinator) dalam pencapaian target 7 (tujuh) komoditas prioritas Kementerian Pertanian
- (2) Pembagian wilayah binaan
- (3) Pembinaan berjenjang antara pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa.

b. Penguatan BP3K sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di kecamatan

- (1) Revisi Permentan No. 45 tahun 2011 tentang mekanisme tata hubungan kerja antara kelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan dan penyuluhan pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menjadi Peningkatan Produksi Pangan Nasional (saat ini masih dalam proses);
- (2) Permintaan untuk melibatkan BP3K dan Penyuluh dalam penyusunan pedoman umum Eselon I untuk pelaksanaan kegiatan di daerah (melalui Surat Kepala BPPSDMP kepada Es. 1 Nomor: 627/SM.600/J/01/2014, 30 Januari 2014)
- (3) Perbaikan manajemen BP3K melalui database, pelatihan manajemen sebanyak 300 Kepala BP3K/BPP, latihan kunjungan dan supervisi (LAKU SUSI), monitoring dan evaluasi (monev) serta pelaporan;
- (4) Penjabaran target nasional sampai tingkat desa;
- (5) Pusat data dan informasi pertanian;
- (6) Forum Koordinasi program dan kegiatan lintas sektor dan sub sektor di wilayah;
- (7) Pengklasifikasian BP3K/BPP;
- (8) Pengembangan BP3K model;
- (9) Revitalisasi program;
- (10) Koordinasi dan sinergisme BP3K;
- (11) Peningkatan manajemen pimpinan/pengelolaan BP3K.



c. Pemberdayaan penyuluh PNS, THL-TBPP dan Swadaya/swasta

- (1) Peningkatan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat
- (2) Peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan (dasar, alih kelompok, dan teknis agribisnis);
- (3) Bimbingan teknik/ Apresiasi/ latihan kunjungan/ magang/ studi banding;
- (4) Sertifikasi profesi penyuluh.
- (5) Penumbuhan dan peningkatan peran Penyuluh Swadaya;
- (6) Optimalisasi peran Penyuluh Swasta;
- (7) Evaluasi Kinerja Penyuluh (PNS dan THL-TBPP) secara kontinyu dan berjenjang;

d. Pemberdayaan Poktan, Gapoktan, dan BUMP

Pemberdayaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing dengan cara:

- (1) Pemberdayaan P4S;
- (2) Pelatihan dan magang;
- (3) Pemberdayaan petani/P4S dalam bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan;
- (4) Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- (5) Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui *Community Development*;
- (6) Pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha;
- (7) Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di sentra produksi melalui kursus tani, hari lapang petani, rembug tani, dan lainnya;
- (8) Pengawasan dan Pendampingan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;
- (9) Penumbuhan dan Pengembangan KEP /BUMP melalui jejaring dan kemitraan usaha;
- (10) Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok.



e. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian melalui sistem teknologi, informasi dan komunikasi pertanian

Pengembangan informasi penyuluhan pertanian dilakukan untuk mempercepat alih teknologi ke petani, melalui :

- (1) Integrasi dan pengembangan materi *cyber extension* di 1.142 Kecamatan dengan sistem informasi usaha agribisnis;
- (2) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (televisi dan radio), media cetak (majalah *extensia*, *leaflet*, brosur, liptan, dan poster), dan *e-learning*;
- (3) Penyediaan informasi melalui Tabloid dan Majalah pertanian;
- (4) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, dan ketenagaan penyuluhan;
- (5) Peningkatan hubungan antara kelembagaan teknis, penelitian, dan penyuluhan dalam desiminasi informasi;
- (6) Sinkronisasi kegiatan dan anggaran dengan Eselon Satu Teknis Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi;
- (7) Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi.

f. Penguatan program dan kerjasama

- (1) Penyempurnaan program penyuluhan pertanian pada berbagai tingkat pemerintahan;
- (2) Program penyuluhan difokuskan pada diseminasi teknologi, penyuluhan, pelatihan, percontohan dan sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan masif "**Jajar Legowo**"; termasuk varietas yang dihasilkan Litbang;
- (3) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan penyuluhan;
- (4) Peningkatan peran STPP/SMK-PP, BBPP/BPP, dan perguruan tinggi lainnya dalam penguatan BP3K dan pemberdayaan petani.

g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana

- (1) Penguatan sarana dan prasarana meliputi bangunan, meubelair, kendaraan operasional penyuluh, sarana pembelajaran penyuluhan, komputer, *soil tester*, pengadaan alat bantu penyuluh (baju



seragam, jas hujan, sepatu boot, topi, jaket) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Pemanfaatan lahan BP3K sebagai media pembelajaran penyuluh melalui kegiatan kaji terap teknologi yang difasilitasi oleh BPTP;
- (3) Integrasi *cyber extension* dengan sistem usaha agribisnis;

2. Strategi Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian:

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk revitalisasi pendidikan tinggi pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, diantaranya:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan
- b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
- d. Pengembangan kerjasama
- e. Pengembangan SKKNI sektor pertanian
- f. Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian
- g. Peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian, dan
- h. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian.

Penjabaran operasional dijabarkan sebagai berikut:

a. Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan;

- (1) Penyusunan pedoman standardisasi sarana dan prasarana di STPP
- (2) Penyusunan pedoman standardisasi sarana dan prasarana di SMK-PP
- (3) Pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

b. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;

- (1) Penyempurnaan pedoman penilaian dan pengangkatan dosen/guru
- (2) Pelatihan, magang, dan *study visit* bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan
- (3) Penelitian dosen dan uji widya guru
- (4) Pendidikan S2 dan S3
- (5) Pelatihan profesi dan sertifikasi guru.



- c. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;**
- (1) Sosialisasi penerimaan siswa SMK-PP dan Mahasiswa STPP
 - (2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan diklat di STPP
 - (3) Pembukaan program studi baru di STPP
 - (4) Pengabdian kepada masyarakat, desa binaan/mitra, pemberdayaan masyarakat, kerjasama penelitian
 - (5) Pengawasan/pendampingan program empat sukses pembangunan pertanian melalui praktek kerja lapangan bagi siswa dan penulisan KIPA mahasiswa STPP
 - (6) Penyempurnaan pedoman tugas belajar
 - (7) Penyempurnaan kurikulum, evaluasi hasil belajar mahasiswa dan pedoman kehidupan kampus di STPP.
- d. Pengembangan kerjasama;**
- (1) Pengembangan kerjasama pendidikan dengan pemangku kepentingan
 - (2) Pola kemitraan dalam rangka penguatan sarana dan prasarana
 - (3) Koordinasi dan kerjasama lintas sektor/ subsektor
 - (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam/luar negeri.
- e. Pengembangan SKKNI sektor pertanian;**
- (1) Penyusunan SKKNI sektor pertanian
 - (2) Pengembangan model pembelajaran berbasis kompetensi
 - (3) Koordinasi dan sinergitas program standardisasi sektor pertanian.
- f. Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi pertanian;**
- (1) Inisiasi pembentukan LSP sektor pertanian
 - (2) Akreditasi TUK sektor pertanian.
- g. Peningkatan kompetensi ketenagaan sertifikasi pertanian; dan**
- (1) Pemeliharaan sertifikat kompetensi asesor
 - (2) Bimbingan teknis asesor kompetensi.
- h. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi profesi pertanian**
- (1) Penyusunan perangkat lunak sertifikasi (skema sertifikasi, pedoman, petunjuk pelaksanaan, materi uji kompetensi)
 - (2) Penjaminan mutu sertifikasi profesi pertanian



- (3) Fasilitasi sertifikasi profesi SDM Pertanian
- (4) Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi profesi SDM Pertanian.

3. Strategi Pendidikan Menengah Pertanian:

- a. Menyiapkan SMK-PP Negeri UPT Badan PPSDMP sebagai SMK Unggulan melalui manajemen penyelenggaraan sekolah yang berorientasi pada mutu dan ciri khas
- b. Pencitraan pendidikan menengah pertanian untuk memperluas kerjasama yang sinergis dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, Lembaga penyuluhan dan penelitian, serta Lembaga lain yang terkait di Dalam dan Luar Negeri
- c. Peninjauan program keahlian kurikulum dan pembelajaran secara berkala sesuai kebutuhan pembangunan pertanian.

4. Strategi Pemanjapan Sistem Pelatihan Pertanian:

Langkah operasional yang ditempuh dalam mewujudkan strategi untuk pemanjapan sistem pelatihan pertanian untuk meningkatkan daya saing dan kinerja balai pelatihan, diantaranya:

- a. Standarisasi mutu layanan kediklatan
- b. Peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan
- c. Pengembangan dan pemberdayaan P4S
- d. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan
- e. Pemanjapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi
- f. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan, dan
- g. Koordinasi internal (lintas eselon I) dan eksternal (lintas sektor).

Penjabaran dari langkah operasional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Standarisasi mutu layanan kediklatan:

- (1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), diklat audit internal dan eksternal, dan survey
- (2) Studi Banding untuk mempersiapkan ISO 14001:2004 (lingkungan)
- (3) Balai pelatihan mendapatkan ISO 9001/2008.



b. Peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan

- (1) Optimalisasi sarana dan prasarana diklat
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mewujudkan akreditasi program pelatihan.

c. Pengembangan dan pemberdayaan P4S;

- (1) Klasifikasi P4S
- (2) Penguatan Kelembagaan P4S
- (3) Kerjasama diklat/magang bagi pengelola P4S
- (4) Pendayagunaan Pengelola P4S menjadi Penyuluh Swadaya
- (5) Jejaring bisnis/temu usaha
- (6) Fasilitasi kerjasama P4S dengan lintas eselon satu Kementerian Pertanian, lintas Kementerian lain dan swasta.

d. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan;

- (1) Peningkatan profesionalisme Widyaiswara dan tenaga kediklatan lainnya melalui diklat, magang, seminar dan workshop di dalam/luar negeri
- (2) Pelaksanaan workshop dan seminar di UPT Pelatihan dengan mengundang peneliti, dosen, penyuluh pertanian dan praktisi
- (3) Pelaksanaan *Management of Training (MOT)*, *Training of Committee (TOC)*, *Training of Facilitator (TOF)*, studi banding bagi Widyaiswara
- (4) Koordinasi dalam rangka sertifikasi jabatan widyaiswara.

e. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi;

- (1) Penyelenggaraan diklat mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur
- (2) Pengembangan penyelenggaraan diklat berbasis kontrol kualitas hasil melalui teknologi informasi
- (3) Sinergitas penyelenggaraan diklat dengan UPT Daerah/ P4S dan Pendayagunaan fasilitator berasal dari Dosen dan Praktisi
- (4) Pelaksanaan MoU lintas sektor dalam penyelenggaraan diklat
- (5) Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi/CBT (*Competency Base Training*) sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan/atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).



f. Pengembangan program dan jejaring kerjasama pelatihan; dan

- (1) Pembinaan dan koordinasi program pementapan sistem pelatihan pertanian
- (2) Pengembangan program serta jejaring kerjasama pelatihan
- (3) Kerjasama dalam/luar negeri melalui sistem kediklatan (penyelenggaraan diklat, pendayagunaan tenaga kediklatan, pemanfaatan sarana dan prasarana diklat)
- (4) Kerjasama magang luar negeri (Asosiasi Petani Jepang).

Terkait dengan jejaring kerjasama, untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, diperlukan program tematik sebagai kegiatan yang secara langsung berimplikasi terhadap pertumbuhan di sektor pertanian. Program tematik yang berhubungan dengan sektor pertanian diantaranya pengarusutamaan gender, ketenagakerjaan, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta Kerjasama Selatan-Selatan (KSS).

Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), merupakan perwujudan kerja sama antar negara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, non kondisionalitas, saling menguntungkan dan *non-interference*. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama di sektor pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.

g. Koordinasi internal (lintas eselon I) dan eksternal (lintas sektor)

- (1) Koordinasi dalam rangka menjaring kebutuhan diklat dari eselon satu lingkup Kementerian Pertanian melalui e-Proposal/ Musrenbang, rapat koordinasi eselon satu dan UPT Pelatihan Pertanian
- (2) Kunjungan ke eselon satu lainnya, terkait dengan penyelenggaraan dan identifikasi kebutuhan diklat
- (3) Menyiapkan kebutuhan pelatihan lintas sektoral
- (4) Menyiapkan profil UPT, P4S, dan Katalog Diklat.



5. Strategi Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel:

a. Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja;

Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Strategi meliputi:

- (1) Koordinasi perencanaan program dan kegiatan
- (2) Penajaman program skala prioritas
- (3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan
- (4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri
- (5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja
- (6) Penyusunan Standar Biaya
- (7) Pengembangan sistem data informasi terintegrasi
- (8) Pengembangan sistem e-form kinerja penyuluhan.

b. Pengembangan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib;

Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Strategi tersebut meliputi:

- (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNB
- (2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan
- (3) Akuntabilitas laporan keuangan
- (4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan
- (5) Pengembangan tata kelola keuangan.
- (6)



c. Pemantapan reformasi birokrasi melalui pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

d. Penguatan sistem evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

- (1) Pengembangan e-evaluation
- (2) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital
- (3) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi
- (4) Pengembangan dan pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- (5) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI
- (6) Pemantauan Tindak Lanjut Sistem Pengendalian Internal Hasil Pengawasan (TLHP)
- (7) Pengembangan sistem pelaporan.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan PPSDMP dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.



Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, maka perlu dilakukan *review* terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian yang lebih baik. Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian ke depan:

- 1) Regulasi Perlindungan Petani
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai
 - Jaminan Luasan Lahan Pertanian
 - Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani
- 3) Rancangan Peraturan Menteri mengenai
 - Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
 - Jenis Risiko-Risiko lain
 - Pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian
 - Persyaratan Petani yang Berhak Memperoleh Bantuan Modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Sertifikasi Kompetensi (petani)
- 4) Regulasi Kelembagaan Penyuluhan: Peraturan Presiden mengenai kelembagaan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.

D. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran)
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*



3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan
8. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di Pusat, UPT sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis, sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global dengan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia.

Dalam mewujudkan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan 2015-2019 sesuai dengan visi dan misi, maka arah penyusunan kelembagaan Badan PPSDMP seperti pada: tugas, fungsi dan susunan organisasi eselon II dan UPT Badan PPSDMP akan ditetapkan dengan peraturan presiden. Organisasi eselon II ke bawah disusun sebagai pelaksana mandat/ prioritas eselon I, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi. Besaran organisasi masing-masing eselon II, III dan IV tidak harus sama atau seragam, tetapi sesuai dengan beban kerja. Pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV juga didukung oleh peran pejabat fungsional khusus.

Badan PPSDMP telah memiliki jabatan fungsional khusus terdiri atas: (1) Penyuluh Pertanian; (2) Guru; (3) Dosen; (4) Widyaiswara; dan (5) Instruktur; (6) Pustakawan; (7) Statistisi; (8) Pranata Komputer; (9) Arsiparis; (10) Analis Kepegawaian; (11) Perencana; (12) Pranata Humas; (13) Pranata Lab Kesehatan; (14) Pranata Lab Pendidikan; dan (15) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.



Secara hierarki di daerah, Badan PPSDMP memiliki 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan organisasi mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kebijakan strategis dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan organisasi eselon I.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup Badan PPSDMP dan instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan ini belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan



antara pusat dan daerah di bidang pertanian. Dengan demikian, penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019 ini ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja lingkup Badan PPSDMP dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Terkait dukungan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan PPSDMP didukung oleh ASN sebanyak 2.247 orang (data per November 2014) yang tersebar di kantor pusat dan 19 UPT lingkup Badan PPSDMP. Jumlah ASN di lingkungan Badan PPSDMP bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, yang disebabkan oleh antara lain: mutasi pegawai baik kedalam maupun keluar, pensiun, meninggal dunia, rekrutmen baru (CPNS), promosi serta demosi pegawai, dan sebagainya.





BAB V

PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





V. PROGRAM, INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Program

Program Badan PPSDMP Tahun 2015 – 2019 adalah **Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian** dengan fokus peningkatan efektifitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Program digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP dengan tujuan untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran; (3) menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan (5) melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama Badan PPSDMP tahun 2015-2019 meliputi:

1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)
3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)
4. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)
5. Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)
6. Jumlah aparatur pertanian dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)

C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Badan PPSDMP selama tahun 2015-2019 akan diimplementasikan kedalam 4 kegiatan utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target IKK kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel 12, Lampiran 1 dan Lampiran 2.



Tabel 13. Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015-2019

No	Program/Kegiatan/IKK	Target	Anggaran (Rp. Milyar)
	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian		12.348,63
I	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian		6.319,90
1	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi (Unit)	29.427	
2	Jumlah Kelembagaan Petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	146.328	
3	Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi (Orang)	285,748	
4	Jumlah Dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)	361	
II	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian		1.868,41
1	Jumlah Profesi bidang pertanian yang distandarisasi (Orang)	25	
2	Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi (Orang)	20.500	
3	Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	145	
4	Jumlah ketenagaan pendidikan pertanian serta standardisasi dan sertifikasi profesi yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (Orang)	4.333	
5	Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian dan Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana dan mahasiswa yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan (orang)	36.426	



No	Program/Kegiatan/IKK	Target	Anggaran (Rp. Milyar)
6	Jumlah dukungan Revitalisasi Pendidikan Pertanian dan Pengembangan Standarisasi serta Sertifikasi Profesi SDM Pertanian (Bulan)	60	
III	Pendidikan Menengah Pertanian		379,6
1	Jumlah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)	92.103	
2	Jumlah Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	420	
3	Jumlah Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	2.765	
4	Jumlah Dokumen Program, kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian (Dokumen)	103	
5	Jumlah Dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)	60	
IV	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		3.378,08
1	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (kelembagaan UPT Pusat, UPT Daerah, P4S, Agro Techno Park) (Unit)	1.464	
2	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang)	6.660	
3	Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	126,116	
4	Jumlah Non Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	82,396	
5	Jumlah Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan serta pemberdayaan petani yang dihasilkan (Dokumen)	1,325	
6	Jumlah desa yang meningkat Kapasitasnya melalui program READ (desa)	30	



No	Program/Kegiatan/IKK	Target	Anggaran (Rp. Milyar)
7	Jumlah Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)	60	
V	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian		406,27
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi, pelaporan, kehumasan dan perpustakaan (Dokumen)	351	
2	Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Bulan)	60	



BAB VI

PENUTUP





VI. PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian, tujuan dan sasaran penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian tahun 2015-2019 akan diwujudkan melalui pencapaian target utama yaitu: (1) meningkatkan kemandirian kelembagaan petani; (2) peningkatan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian dan (3) peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian. Target utama tersebut akan diwujudkan melalui Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

Tersusunnya Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam penetapan program dan kegiatan operasional di unit kerja lingkup Badan PPSDMP. Hal strategis untuk mewujudkan peran penting penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian adalah mensinergiskan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan SDM Pertanian. Namun demikian, dengan kedinamisan dan tuntutan perubahan serta adanya kebutuhan pengembangan organisasi dan tuntutan masyarakat secara umum, sangat dimungkinkan belum terakomodasinya beberapa kebijakan dan dukungan kegiatan untuk menjawabnya. Untuk itu adanya perubahan atau reviu terhadap Renstra mungkin saja terjadi, sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatannya, agar pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Tahun 2015-2019 dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Diperlukan komitmen, tekad dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah operasional berdasar pada kebijakan yang proporsional dan profesional sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta peran masing-masing.



Lampiran 1. Program, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan PPSDMP Tahun 2015-2019 (Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2015 dan APBN-P Tahun 2015, serta Pagu Indikatif 2016)

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	TARGET					PAGU ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian							1.293,61	2.383,40	2.636,22	2.876,39	3.158,98
1. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani	1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17.808	31,220	32,250	32,350	32,700					
	2. Jumlah BP3K yang meningkat kapasitasnya (unit)	4.132	5,538	5,638	5,650	5,750					
	3. Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	48.608	58,860	59,060	59,360	59,860					



Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	TARGET					PAGU ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur	1. Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5,065	5,100	5,150	5,200	5,250					
	2. Jumlah SDM pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2,475	3,225	3,225	3,225	3,225					



Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	TARGET					PAGU ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
3. Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja (orang)	25.760	44,340	45,227	46,131	47,054					



Lampiran 2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Utama Badan PPSDMP Tahun 2015-2019
(Berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun 2015 dan APBN-P Tahun 2015, serta Pagu Indikatif 2016)

Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian						1.293,61	2.383,40	2.636,22	2.876,39	3.158,98
A. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian						680,63	1.172,90	1.341,04	1.475,37	1.649,89
Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah										
1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi (Unit)	4,671	6,083	6,183	6,195	6,295					
2. Jumlah Kelembagaan Petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	17,808	31,220	32,250	32,350	32,700					
3. Jumlah Ketenagaan Penyuluhan yang difasilitasi (Orang)	48,608	58,860	59,060	59,360	59,860					
4. Jumlah Dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)	68	68	73	74	78					



Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
B. Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian						191,01	393,72	404,30	429,66	449,72
Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda										
1. Jumlah profesi bidang pertanian yang distandarisasi (Dokumen)	5	5	5	5	5					
2. Jumlah SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	3,300	4,300	4,300	4,300	4,300					
3. Jumlah kelembagaan pendidikan tinggi pertanian dan sertifikasi profesi pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	23	26	29	32	35					
4. Jumlah ketenagaan pendidikan tinggi pertanian serta standarisasi dan sertifikasi profesi yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (Orang)	824	854	870	885	900					



Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
5. Jumlah SDM Pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian dan Aparatur Pertanian yang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana dan mahasiswa yang menjadi petugas pendampingan program swasembada pangan (orang)	3,006	7,605	8,305	8,605	8,905					
6. Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan pertanian dan pengembangan stadarisasi serta sertifikasi profesi SDM Pertanian (bulan)	12	12	12	12	12					
C. Pendidikan Menengah Pertanian						59,60	69,45	75,81	82,13	88,98
Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda										
1. Jumlah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)	18.403	18.410	18.420	18.430	18.440					
2. Jumlah Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	84	84	84	84	84					



Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
3. Jumlah Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	381	596	596	596	596					
4. Jumlah dokumen program, kerjasama dan penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian yang dihasilkan (dokumen)	13	15	20	25	30					
5. Jumlah dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (bulan)	12	12	12	12	12					
D. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian						299,45	668,08	731,60	801,26	877,69
Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis mendukung Agro Techno Park (ATP)										
1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian (orang)	15.080	26,940	27,479	28,028	28,589					
2. Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian (orang)	10.680	17,400	17,748	18,103	18,465					



Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
3. Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (kelembagaan UPT Pusat, UPT Daerah, P4S, inkubator agribisnis mendukung ATP (Unit)	228	300	306	312	318					
4. Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang)	1.204	1,324	1,350	1,377	1,405					
5. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya melalui replikasi program READ (Unit)	30	-	-	-	-					
6. Jumlah Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan serta pemberdayaan petani yang dihasilkan (Dokumen)	255	260	265	270	275					
6. Jumlah Dukungan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian (Kegiatan)	12	12	12	12	12					



Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
E. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian						62,92	79,21	83,47	87,97	92,70
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen										
1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, evaluasi, pelaporan, kehumasan dan perpustakaan (Dokumen)	71	70	70	70	70					
a. Dokumen Perencanaan Program dan Kerjasama, Anggaran, serta Data dan Informasi SDM Pertanian (Dokumen)	25	25	25	25	25					
b. Dokumen Perundang-undangan, Kepegawaian, dan Rumah Tangga (Dokumen)	16	15	15	15	15					



Program/Kegiatan Utama/IKK	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (Rp Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
c. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan (Dokumen)	18	18	18	18	18					
d. Dokumen Evaluasi, Pelaporan, Kehumasan dan Perpustakaan (Dokumen)	12	12	12	12	12					
2. Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Bulan)	12	12	12	12	12					



Lampiran 3.

DAFTAR ALAMAT STPP BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	ALAMAT SEKOLAH		Spesialisasi	Alamat Website
1	STPP BOGOR Jln. Aria Surialaga (d/h Cibalagung) No.1 Kotak Pos 188 BOGOR 16001	(0251) 8312386 (0251) 8351063	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Peternakan	stpp.bogor@deptan.go.id www.stpp-bogor.ac.id
2	STPP MEDAN Jln. Binjai Km.10 Medan, Tromol Pos 18, MEDAN 20002	(061) 8446669 (061) 8451544	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Perkebunan	www.stppmedan.ac.id info@stppmedan.ac.id
3	STPP MALANG Dr. Cipto 144.A, Bedali, LAWANG-MALANG 65200 Kotak Pos 144	0341-427771 427772, 427773 (Telp)	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Peternakan	stpp.malang@yahoo.co.id www.stpp.malang.ac.id
		0341-427774 (Fax)		-
5	STPP MAGELANG Jurusan Pertanian di Yogyakarta Jln. Kusumanegara No.2 Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta 55167	(0274) 373479 (0274) 375528	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Peternakan	stpp_jogja@yahoo.co.id
	STPP MAGELANG-Kopeng Jur. Peternakan Km.7 Kotak pos 152 MAGELANG 56101	0293-313024 364188 0293- 313032	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Peternakan	info@stppmagelang.ac.id www.stppmagelang.ac.id
6	STPP GOWA Jln. Malino Km. 7 Romanglompoa Kec.Bontomarannu Kab. Gowa, SULSEL 92171	(0411) 861127	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Peternakan	www.stpp-gowa.ac.id stpp@stpp-gowa.ac.id
7	STPP MANOKWARI Jln. SPMA, Reremi, Manokwari, PAPUA BARAT 98312	(0986) 2119 93 (0986) 213223	Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Peternakan	www.deptan.go.id/bpsdmp/stpp-manokwari stpp_reremi@yahoo.co.id
8.	SPP SEMBAWA Jln. Palembang-Pangkalan Balai Km.29 Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin, Kode Pos 30753A	0711-7439059 0711-7439058 0711-7439058	Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanaman Perkebunan	spp.sembawa.sch.id sppn_sembawa@yahoo.com



No.	ALAMAT SEKOLAH		Spesialisasi	Alamat Website
9.	SPP Kupang Jln. Timor Raya Km. 39-Lili, Fatuleu, KP. 53, Kupang, NTT	0380-833939 0380-8050939	Peternakan Kesehatan Hewan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Penyuluhan Pertanian	smkppnkupang.sch.id spp_kupang@yahoo.com
10.	SPP Banjarbaru	0511-4772317, 0511-4772468	Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanaman Perkebunan	www.spmabanjarbaru.sch.id admin@spmabanjarbaru.sch.id



LAMPIRAN 4

PENYELENGGARA DAN KEGIATAN DIKLAT PERTANIAN

A. UPT PELATIHAN PERTANIAN PUSAT

	Nama Balai	Alamat	Website	Diklat Unggulan	Diklat Terakreditasi	Fasilitas	Keterangan
1	PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP), CIAWI, BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Jl. Raya Puncak KM. 11 Kotak Pos 26 Ciawi, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16720 Telp/Faks: (0251) 8241147, 8240149	ppmkp_ciawi@yahoo.com	Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	1. Diklat Diklat PIM III dan IV 2. Diklat Teknis Perencanaan Pertanian 3. Diklat Metodologi Penyuluhan Pengeluaran 4. Diklat Teknis Bendaharawan 5. Diklat Teknis Kewirausahaan Bagi Petani Muda 6. Diklat Teknis Metodologi Bagi Pengelola Gapoktan dan P4S 7. Diklat Display Pameran 8. Diklat Audio Visual.	1. Kapasitas Asrama : 665 orang (6 unit) 2. Kapasitas Aula : 1.000 orang (4 unit) 3. Kapasitas Kelas : 640 orang (15 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 640 orang (5 unit) 5. Kapasitas Guest House : 34 orang (8 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 0,8Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 2. Jumlah Widyaiswara : 22 orang 3. Instruktur : 5 orang
2	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN (BBPKH) CINAGARA, PROVINSI JAWA BARAT	Jl. Snakma Cisolopa Kec. Caringin Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16740, Po.Box 05 Telp: (0251) 8220077, Fax: (0251) 8221672	www.deptan.go.id/bpsdm/bbpbkh_cinagara Email: poewadikarta@yahoo.com windibogor@yahoo.com	Diklat Kesehatan Hewan	1. Diklat Kesehatan Hewan bagi Asisten Dokter Hewan; 2. Inseminasi Buatan bagi Calon Inseminator 3. Diklat Teknis Pelatihan Kebuntingan 4. Diklat Pemeriksa Kesehatan Daging (Keurmaster) bagi Petugas	1. Kapasitas Asrama : 145 orang (2 unit) 2. Kapasitas Aula : 150 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 160 orang (3 unit) 5. Kapasitas Guest House : 8 orang (2 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 18,5 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah pegawai : 2. Jumlah Widyaiswara : 20 orang



Rencana Strategis BPPSDMP 2015-2019

	Nama Balai	Alamat	Website	Diklat Unggulan	Diklat Terakreditasi	Fasilitas	Keterangan
3	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG, PROVINSI JAWA BARAT	Jalan Maribaya 102 Lembang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40391 Telp. /Fax. (022) 2786234, 2789783	www.deptan.go.id/bpsdm/bbpps-lembang central@bbpps_lembang.info	1. Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3); 2. Diklat Teknis Kultur Jaringan Hortikultura; 3. Diklat Teknis Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	1. Diklat Metodologi Penyuluhan Pertanian Partisipatif (MP3); 2. Diklat Teknis Budidaya Kisan; 3. Diklat Teknis Produksi Cabe Merah; 4. Diklat Teknis Pengolahan Pertanian; 5. Diklat Teknis Agribisnis berbasis Hortikultura; 6. Diklat Teknis Sistem Jaminan Mutu (HACCP) Komoditas Hortikultura; 7. Diklat Teknis Kultur Jaringan Hortikultura; 8. Diklat Teknis Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura; 9. Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Terampil, Ahli, dan Alih Kelompok	1. Kapasitas Asrama : 152 orang (3 unit) 2. Kapasitas Aula : 300 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 150 orang (5 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest Hpuse : 32 orang (4 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 10,1 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 134 orang 2. Jumlah Widyaiswara : 30 orang 3. Jumlah Fungsional Umum : 93 orang
4	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN, PROVINSI JAWA TIMUR	Jl. Ketindan No. 1 PO Box 123 Lawang, Malang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65214 Telp: (0341) 426235, 426985 Fax. (0341) 426235	www.deptan.go.id/bpsdm/bbpps-ketindan bbpps-ketindan@deptan.go.id	Diklat Tanaman Pangan dan Diklat Tanaman Obat	1. Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Obat Rimpang 2. Diklat Teknis Agribisnis Kedele 3. Diklat PTT Padi 4. Diklat Pengolahan Hasil Ubi Jalar dan Ubi Kayu 5. Diklat Budidaya Durian 6. Diklat Budidaya Cabe Merah 7. Diklat Agribisnis Tanaman Buah Jeruk 8. Re-Akreditasi Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Obat Rimpang 9. Diklat Good Agricultural Practice Sayur	1. Kapasitas Asrama : 130 orang (5 unit) 2. Kapasitas Aula : 100 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 220 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 225 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 18 orang (3 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 4,1 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 2. Jumlah Widyaiswara : 16 g



	Nama Balai	Alamat	Website	Diklat Unggulan	Diklat Terakreditasi	Fasilitas	Keterangan
5	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU, PROVINSI JAWA TIMUR	Jalan Songgoriti No. 24 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 65301, Kotak Pos 17 Telp/ Faks: (0341) 591302/ 597032	http://bapelnak-batukota.deptan.go.id , batuoepic@yahoo.com	Diklat Persusuan dan Diklat Teknologi Hasil Ternak	1. Diklat Budidaya Ternak Perah, 2. Diklat Teknologi Hasil Ternak, 3. Diklat Kesehatan dan Reproduksi Sapi Potong, 4. Diklat Teknis Inseminasi Buatan, 5. Diklat Pengolahan Limbah Ternak, 6. Diklat Sapi Perah Bagi Petugas Teknis Peternakan, 7. Diklat Budidaya Sapi Potong Bagi Penyuluh Peternakan, 8. Diklat Agribisnis Sapi Perah, 9. Diklat Pakan Ternak dan Hijauan Bagi Penyuluh/Petugas, 10. Diklat Dasar bagi Wastukan Ahli & Alih Kelompok, 11. Diklat Dasar bagi Penyuluh Pertanian Ahli & Alih Kelompok, 12. Diklat Medik & Paramedik Veteriner	1. Kapasitas Asrama : 202 orang (7 unit) 2. Kapasitas Aula : 200 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 180 orang (6 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House 6. Kapasitas Lahan Praktek : 25 orang (3 unit) 2,7 Ha 7. Instalasi : 7 unit 8. Perpustakaan : 2.900 buku 9. Olah Raga	1. Jumlah Pegawai : 2. Widyaiswara : 23 orang
6	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Jl. Jend. A.Yani KM 85 Binuang Kode Pos. 71183, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. /Fax. (0517) 36070 (L), 36007 (K)	www.deptan.go.id/bpsdm/bbpps_binuang rkadhi@plasa.com	Diklat Perkebunan, Diklat Teknologi Pasang Surut dan Diklat Pengelolaan Rawa Pasang Surut	1. Optimalisasi Rancang Bangun Paket Teknologi Lahan Rawa Pasang Surut 2. Diklat Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut 3. Diklat Teknis Budidaya Padi Organik 4. Diklat Teknis Agribisnis Karet 5. Diklat Teknis Agribisnis Kelapa Sawit	1. Kapasitas Asrama : 120 orang (4 unit) 2. Kapasitas Aula : 80 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang makan : 125 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 24 orang (5 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 7,5 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah pegawai : 65 orang 1. Pjb Struktural : 11 orang 2. Widyaiswara : 12 orang 3. Instruktur : 1 orang 4. Tenaga Teknis : 42 orang



Rencana Strategis BPPSDMP 2015-2019

	Nama Balai	Alamat	Website	Diklat Unggulan	Diklat Terakreditasi	Fasilitas	Keterangan
7	7. BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BATANG KALUKU, PROVINSI SULAWESI SELATAN	Jl. Malino KM. 3 Sungguminasa Kab. Gowa, Kotak Pos 28 Sungguminasa 92112, Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan. Telp. (0411) 866396, (Fax) (0411) 866396/866570	http://bbpp-batangkaluku.deptan.go.id , email:info@bbpp-batangkaluku.com	Diklat Mekanisasi Pertanian dan Pengelolaan Lahan dan Air	1. Diklat Penanganan Mekanisasi Pertanian 2. Diklat Penanganan Panen dan Pasca Panen Jagung 3. Diklat Tata Guna Air 4. Diklat Budidaya Jagung 5. Diklat Penanganan Pasca Panen Kakao 6. Diklat Teknologi Budidaya Melontarkan 7. Diklat Pengelolaan Limbah Pertanian dan Pupuk Organik 8. Diklat Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Padi 9. Diklat Teknologi Budidaya Kakao Bagi Penyuluh Pertanian	1. Kapasitas Asrama : 220 orang (6 unit) 2. Kapasitas Aula : 250 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 180 orang (6 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 120 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 36 orang (4 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 9,4 Ha 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 2. Widyaiswara : 25 orang
8	8. BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Jalan Timor Raya KM 17, Kotak Pos. 8 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Pos: 85001, Telp. (0380) 823308, 8551166	www.deptan.go.id/bpsdm/bbpp-kupang	1. Diklat Recording Sapi Potong Bagi Penyuluh 2. Diklat Pengelolaan Kebun Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh 3. Diklat Pembibitan Sapi Potong bagi Penyuluh	1. Diklat Agribisnis Sapi Potong Bagi Penyuluh 2. Diklat Agribisnis Ayam Buras Bagi Penyuluh 3. Diklat Agribisnis Ternak Kambing Bagi Penyuluh 4. Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas dan Pupuk Organik Bagi Penyuluh 5. Diklat Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh 6. Diklat Teknis Agribisnis Induk dan Pedet Sapi 7. Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh 8. Diklat Manajemen Hijauan Pakan Ternak Bagi Penyuluh	1. Kapasitas Asrama : 165 orang (5 unit) 2. Kapasitas Aula : 80 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (4 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 10 orang (2 unit) 6. Kapasitas Lahan Praktek : 8,3 Ha 7. Perpustakaan : 1 Unit 8. Olah raga : 2 unit	1. Jumlah Pegawai : 76 orang 2. Widyaiswara : 14 orang 3. Tenaga Teknis : 9 orang



Rencana Strategis BPPSDMP 2015-2019

	Nama Balai	Alamat	Website	Diklat Unggulan	Diklat Terakreditasi	Fasilitas	Keterangan
9	BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BPP) JAMBI, PROVINSI JAMBI	Jalan Raya Jambi-Palembang KM.16 Sungai Tigo, Kotak Pos 225, Jambi 36001, Provinsi Jambi Telp/ Faks: (0741) 24088	www.deptan.go.id/bpsdm/bppjambi eviyantijambi@yahoo.com	Diklat Teknis Agribisnis Perkebunan	1. Diklat Teknis Karet 2. Diklat Teknis Jamur 3. Diklat Teknis Kelapa Sawit 4. Diklat Teknis Pengolahan Kakao 5. Diklat Budidaya Buah Naga	1. Kapasitas Asrama : 150 orang (4 unit) 2. Kapasitas Aula : 100 orang (2 unit) 3. Kapasitas Kelas : 120 orang (3 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 150 orang (2 unit) 5. Kapasitas Guest House : 5 orang (1 unit) 6. Ruang Praktek : 2 unit 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 82 orang 2. Widyaiswara : 17 orang
10	BALAI PELATIHAN PERTANIAN (BPP) LAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG	Jl. R. Gunawan, Tromol Pos 08 UNILA, Provinsi Lampung Telepon: (0721) 789782, Faks : (0721) 703570	www.deptan.go.id/bpsdmp/bpp-lampung ajuna_putra@yahoo.co.id niaoezair72@yahoo.co.id		1. Diklat Teknis Sayuran Organik Dataran Rendah 2. Diklat Budidaya Tanaman Pisang 3. Diklat Teknis Agribisnis Padi 4. Diklat Teknis Agribisnis Jagung	1. Kapasitas Asrama : 95 orang (6 unit) 2. Kapasitas Aula : 150 orang (1 unit) 3. Kapasitas Kelas : 90 orang (3 unit) 4. Kapasitas Ruang Makan : 100 orang (3 unit) 5. Kapasitas Guest House : 12 orang (2 unit) 6. Kapasitas Rang Praktek : 1 unit 7. Perpustakaan : 1 unit 8. Olah Raga : 1 unit	1. Jumlah Pegawai : 68 orang 2. Widyaiswara : 19 orang



**LAMPIRAN 5. REKAPITULASI JUMLAH PENYULUH PERTANIAN PNS, THL-TB PENYULUH PERTANIAN,
DAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA
(s/d DESEMBER 2014)**

NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Aceh	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Pergub. No. 51 Tahun 2009	Jl. T. Nyak Arief No. 221 Banda Aceh 23115 Telp/Fax 0651-7551753, 7551756, 7595077, 7551754. bkp2.acehprov.go.id www.bkp2.acehprov.go.id	18	5	23	286	108	6,321	1,109	1,798	242	3,149
2	Sumatera Utara	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 6 Tahun 2009, tanggal 27 Juli 2009	d/a. Jl. AH. Nasution No.6, Medan Telp/Fax : 061-7874166	25	8	33	414	662	5,025	1,172	1,723	161	3,056
3	Sumatera Barat	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 7 Tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013	Jl. Purus V Gg. Sawo No.I A Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Padang T/F: 0751-35455 bakorluh_sumbar@yahoo.com	12	7	19	176	303	711	792	653	236	1,681



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
4	Riau	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi	Perda No.8 Tahun 2008, tanggal 5 Desember 2008	Jl. Pepaya No. 63 Pekanbaru. Telp/Fax.: 0761 - 849003, 0761-859064. info@bakorluh.riau.go.id http://bakorluh.riau.go.id	10	2	12	154	203	1,426	863	363	110	1,336
5	Jambi	Bakor Penyuluhan Pertanian	Perda No. 7 Tahun 2010, 31 Desember 2010	Jl. Mayjen. Sutoyo Siswomiharjo No. 40, Telanaipura Jambi Telp/Fax.: 0741-62705, 62725 sbakorluhjambi@gmail.com	9	2	11	128	153	1,253	862	341	240	1,443
6	Sumatera Selatan	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 10 Tahun 2011, tanggal 13 April 2011	Jl. Merdeka No.10 A Palembang Telp/ Fax.: 0711-363480, 363481. bakorluhsumsel@yahoo.com www.bakorluh-sumselprov.org	12	4	16	223	371	2,755	1,207	669	188	2,064
7	Bengkulu	Bakor Penyuluhan Provinsi	Perda No.9 Tahun 2008, tanggal 20 Oktober	Jl. Raya Kembang Seri-Air Sebakul Km.6,5 Taba Lagan Talang Empat, Bengkulu. Telp/Fax. 0736-51593 PO	9	1	10	123	148	1,300	634	364	231	1,229



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
			2008	BOX.1086. www.bakorluh.com bakorluhbengkulu@gmail.com										
8	Lampung	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No.12 Tahun 2007, tanggal 12 Desember 2007	Jl. Kantor Pos No. 2, Teluk Betung Utara, Teluk Betung, Bandar Lampung Telp./Fax. 0721-471557 kbakorluhlp@gmail.com	13	2	15	206	174	2,249	950	716	371	2,037
9	Kepulauan Bangka-Belitung	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 2 Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010	Komp Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pem. Prov Bangka Belitung Kel Air Itam, Pangkal Pinang (33418) Telp/Fax: 0717-435224, 435260, 435848 bakorluhbabel@yahoo.co.id/setbakorluhjateng.com	6	1	7	44	61	300	148	125	75	348
10	Kepulauan Riau	Badan Ketahanan Pangan	Perda No. 5 Tahun 2011, tanggal 5	Komplek Perkantoran Pemerintah Prov. Kep. Riau Gedung	5	2	7	59	133	218	36	13	24	73



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
			Agustus 2011	B2 Lantai 2, Pulau Dompok-Tanjung Pinang, Kepulauan Riau										
11	DKI. Jakarta	Dinas Kelautan dan Pertanian	Pergub. No. 87 Tahun 2009	Jl. Gunung Sahari Raya No. 11 Jakarta Pusat. Telp/Fax.: 021- 6007251, 6286625/ 6007247, 6285483	1	5	6	44	267	-	70	38	23	131
12	Jawa Barat	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 3 Tahun 2013, tanggal 21 Pebruari 2013	Jl. Merak No. 13, Bandung- Jawa Barat, T/F 022- 2504508, 2504509. set.bakorluh@jabar prov.go.id	17	9	26	625	636	5,227	1,975	1,702	1,860	5,537
13	Jawa Tengah	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi	Perda No. 10 Tahun 2008, tanggal 7 Juni 2008	Jl. Jend. Gatot Subroto No.1, Komp. Tarubudaya-Unggaran, Semarang. Telp./Fax.: 024- 6924605. setbakorluh_jateng@yahoo.com	29	6	35	573	769	7,820	2,370	2,660	3,241	8,271



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	Perda No.7 Tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2008	Jl. Gondosuli No.6 Yogyakarta, Telp/Fax. 0274-523882, 563937. penyuluhanbkppdiy@gmail.com	4	1	5	78	46	392	296	240	246	782
15	Jawa Timur	Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi	Perda No. 15 Tahun 2012, tanggal 29 Desember 2012	d/a. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari No.173 Surabaya Telp/Fax: 031- 8280879, 8291424. bakorluhjatim@yahoo.co.id	29	9	38	662	782	7,741	2,464	2,559	2,076	7,099
16	Banten	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perda No. 3 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012	Jl. Syeh Nawawi Albatani, Palima, Kawasan Pusat Pem. Prov. Banten, Serang Telp/Fax: 0254-8480013, 8480015. Dinas Pertanian : 0254-267032, 267033. penyuluh.banten@gmail.com	4	4	8	154	262	1,273	244	421	235	900



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
17	Bali	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 8 Tahun 2009, tanggal 26 Pebruari 2009, Pergub No, 18 Tahun 2013, tanggal 26 April 2013	Diperta TP, Jl. WR. Supratman No.71 - Denpasar, Telp./Fax. 0361- 228716, 231987, 231967 *) Dis Nak dan Keswan Jl. Angsoka No. 114 Denpasar Telp/Fax.: 0361-224184, 225368, bakorluhprovbali@yahoo.co.id	8	1	9	57	80	634	700	200	704	1,604
18	Nusa Tenggara Barat	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No.3 Tahun 2009, Tanggal 23 Maret 2009	Jl. Majapahit No.17, Mataram, Telp/Fax: 0370-647625, 640800. bakorluh_ntb@yahoo.co.id	8	2	10	116	136	826	783	593	174	1,550
19	Nusa Tenggara Timur	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian	Pergub. No. 43 Tahun 2009, tanggal 26 Agustus 2009	Jl. Polisi Militer No. 17, Kupang Telp./Fax.: 0380-833281, 833470/ 833159, email: b2kpntt@yahoo.com/ bkpp.nttprov.go.id	20	1	21	293	313	2,612	1,257	923	369	2,549



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
20	Kalimantan Barat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perda No.66 Tahun 2008, tanggal 10 November 2008	Jl. M. Hambal No. 05, Pontianak, Telp./Fax.: 0561-733742, 749242. banketpanluh_kalbar@gmail.com	12	2	14	175	89	1,869	749	410	309	1,468
21	Kalimantan Tengah	Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan	Perda No. 4 Tahun 2012, tanggal 15 Pebruari 2012	Jl. Willem AS No.9, Palangkaraya, Telp/Fax : 0536-3221293, 3229809. perencanaan@gmail.com	13	1	14	131	130	1,339	748	311	44	1,103
22	Kalimantan Selatan	Bakor Penyuluhan Provinsi	Perda No.6 Tahun 2008, tanggal 15 April 2008	Jl. Jend. Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru 70711. Telp/Fax: 0511-4788655, 4781205. sbakorluh_kalsel@yahoo.com	11	2	13	151	142	1,842	855	476	416	1,747
23	Kalimantan Timur	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Pergub No. 59 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008	Jl. Gajah Mada No. 10, Samarinda Telp/Fax.: 0541-738591, 743867, 768230. bkpp-prov.kaltim@yahoo.co.id bkpp.kaltimprov.go.id	10	4	14	140	215	1,245	677	285	72	1,034



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
24	Sulawesi Utara	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No.4 Tahun 2008, tanggal 22 Juli 2008	Komp. Pertanian Kalasey, Po Box 1263, Manado. Telp/Fax. 0431-831788, 831570. eirene_mp@yahoo.com	11	4	15	156	327	1,307	778	191	501	1,470
25	Sulawesi Tengah	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No.03 Tahun 2009, tanggal 18 Februari 2009	Jl. RA. Kartini No.25 B Palu, Telp/Fax. 0451-456157, 421862. bakorluh_sulteng@yahoo.co.id	10	1	11	149	147	1,593	809	362	62	1,233
26	Sulawesi Selatan	Bakor Penyuluhan	Perda No. 12 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009	Jl. DR. Ratulangi No.47 - Makassar, Telp/Fax : 0411-854869, 854692	21	3	24	304	768	2,187	1,798	933	347	3,078
27	Sulawesi Tenggara	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 5 Tahun 2008, tanggal 28 Juli 2008	Jl. Tebaununggu No. 1 Kendari (93111),Telp/Fax: 0401-3126558. bakorluh_sultra@yahoo.co.id	10	2	12	204	345	1,626	689	492	268	1,449



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
28	Gorontalo	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 7 Tahun 2009, tanggal 2 September 2009	Jl. Jend. Sudirman No.57 (ex. Kantor Gubernur), Kota Gorontalo Telp/Fax: 0435-831048. bakorluh.prov.gtlo@gmail.com. Http://bakorluh.gorontaloprov.go.id	5	1	6	70	72	628	318	154	15	487
29	Sulawesi Barat	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No.1, Tahun 2010	Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Komplek Kantor Gubernur Mamuju T/F 0426-2325184 ,2323133 Robibakorluh@gmail.com	6	-	6	69	63	507	388	140	188	716
30	Maluku	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 01 Tahun 2011, tanggal 7 Pebruari 2011	Komplek Dinas Pertambangan Gd. B Jl. Cengkeh No.1, Ambon. Telp./Fax.: 0911-311343, 342311. sdm.bakorluhpromail@gmail.com	9	2	11	77	33	869	396	194	-	590



NO	PROVINSI	Nama Kantor	SK	Alamat Kantor	Kabupaten / Kota *)			Jumlah *)			Jumlah Penyuluh Pertanian			
					Kab.	Kota	Total	Kec	Kel	Desa	PNS	THL-TB	Swadaya	Total
31	Maluku Utara	Bakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Perda No. 12 Tahun 2009, tanggal 1 Oktober 2010	Jl. Raya Gosale Puncak, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi Telp/Fax.: 0921-3110861, 3129049. bakorluhp2k_malut@yahoo.com	7	2	9	112	112	950	329	202	54	585
32	Papua	Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan	Perda No. 13, Tahun 2013	Jl. Raya Kota Raja Albepura Sentani, Jayapura-Papua, Telp. 0967- 591295, 585158, 591318, Fax.: 0967-583306, 585085, 588271, 585501. bid.penyuluhan_papua@yahoo.co.id	28	1	29	381	88	3,909	612	408	81	1,101
33	Papua Barat	Bakor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Perda No. 6 Tahun 2009, tanggal 23 Pebruari 2009	Jl. Trikora Arfa'i Kompleks Perkantoran Base Camp Lokpon Manokwari, Papua Barat 98313 Telp/Fax:-0986-214010	10	1	11	160	78	1,295	364	155	6	525
TOTAL					402	98	500	6,694	8,216	69,249	27,476	20,814	13,169	61,459

*Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP, 31 Desember 2014.



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

